



# Swantara

Majalah Triwulanan Lemhannas RI No. 21 Tahun VI / Juni 2017

- **Geopolitik Indonesia Lebih Mengedepankan Ideal Politik**  
*Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti*
- **Jalan Panjang Kebangkitan Asia**

- **Profil:**  
**Drs Sukendra Martha. M.Sc., M.App.Sc**  
*Tenaga Profesional Bidang Politik  
Dalam Negeri Lemhannas RI*



**Jakarta Geopolitical Forum 2017**  
*Merespon Tatahan Dunia yang Berubah*



Sosialisasi program pendidikan PPRA LVII & LVIII yang dilaksanakan di ruang Syailendra Gd. Astagatra Lt. III pada Rabu 17 Mei 2017.



Delegasi Glasgow University Prof. Anton Muscatelli yang merupakan konsultan President University dan Direksi PT. Jababeka mengunjungi Lemhannas RI pada Rabu 26 April 2017.



ILUSTRASI COVER: INVESTMENTU.COM

**PELINDUNG** AGUS WIDJOJO

**PEMBINA** BAGUS PURUHITO

**PENASEHAT** ARIF WACHYUNADI

**PENGARAH REDAKSI** ALBERT INKIRIWANG, TONY SB HOESODO,

**PEMIMPIN REDAKSI** MINDARTO

**REDAKTUR PELAKSANA** WAHYU WIDJI PAMUNGKAS

**EDITOR** ENDAH HELIANA, NI MADE VIRA SARASWATI, C. HILDAMONA PERMATASARI, MAGISTA DIAN

**KOORDINATOR FOTOGRAFER** M. ISDAR

**FOTOGRAFER** SURYADI, SUYONO

**GRAFIS** BAMBANG IMAN ARYANTO

**PEMIMPIN ADMINISTRASI** LINDA PURNAMASARI

**STAF ADMINISTRASI** MARDIANA, GATOT

**ALAMAT REDAKSI** LEMHANNAS RI

JL. MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA

**TELP.** (021) 3832108, 3832109

**FAX**(021)-3451926

**EMAIL** : [humas@lemhannas.go.id](mailto:humas@lemhannas.go.id)

**WEBSITE** : [www.lemhannas.go.id](http://www.lemhannas.go.id)

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN  
SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR  
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA  
SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI



# Catatan Redaksi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,  
Om Swasti Astu

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Majalah Swantara Edisi 21 Bulan Juni 2017, kembali hadir ditengah-tengah para pembaca setia.

Pada edisi-21 ini, sebagai kelembagaan, Swantara kini dikemas sedikit lebih berbeda dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Dengan mengangkat tema kegiatan Jakarta Geopolitical Forum, edisi ini juga memuat berbagai kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 tahun.

Jakarta Geopolitical Forum yang merupakan kegiatan forum akademis dan berskala internasional tersebut membahas dinamika geopolitik global. Dinamika dari berbagai negara maupun regional/kawasan, sesungguhnya memberikan efek dan dampak yang belum tentu sejalan dengan kepentingan nasional kita.

Pada edisi ke-21 ini, redaksi juga menampilkan beberapa artikel yang terkait dengan infrastruktur dari berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku dan peneliti) sehingga menjadi lebih komprehensif. Selain itu, redaksi masih menampilkan beberapa rubrik *intermezzo*, *hot issue*, dan seputar kita. Sedangkan Profil yang menampilkan pejabat dan staf serta Suara Alumni yang menghadirkan berbagai alumni pendidikan reguler dan singkat angkatan, masih menjadi rubrik yang masih mewarnai Majalah Swantara.

Redaksi menyadari jika penyusunan penerbitan Majalah Swantara edisi kali ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya kami tetap mengharapkan kritikan dan masukan demi eksistensi dan kemajuan dari karya jurnalistik yang akan kami sajikan di edisi mendatang. Tak lupa kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 21 kali ini. Semoga, Majalah Swantara tetap dihati para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Salam Sejahtera  
Om Shanti Shanti Shanti Om

Pemimpin Redaksi



# Salam Ketahanan Nasional



**P**ada tanggal 18 hingga 20 Mei 2017 lalu, Lemhannas RI menggelar Jakarta Geopolitical Forum, sebuah forum berskala internasional pertama di dunia yang membahas mengenai berbagai permasalahan geopolitik, dari perspektif berbagai negara. Forum ini menghadirkan sekitar 22 pembicara kompeten, yang terdiri dari 17 pembicara luar negeri, yaitu dari Amerika Serikat, Kanada, Rusia, China, Jepang, Australia, Inggris, Perancis, Austria, Turki, Mesir, Singapura, serta lima pembicara dari dalam negeri.

Lemhannas RI menggelar forum besar ini bukan tanpa alasan. Sejak awal pendirian Lemhannas oleh Presiden RI pertama pada 20 Mei 1965, lembaga ini dibentuk karena adanya kebutuhan akan studi mendalam tentang geopolitik. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno pada kuliah umum pertamanya di Lemhannas RI tentang geopolitik, 52 tahun lalu: Kenali dirimu, kenali negaramu, kenali pulau-pulaumu, kenali tanah airmu, ciptakanlah strategi untuk pembangunan dan strategi untuk pertahanan berdasarkan pada kondisi geopolitikmu.

Pemahaman akan geopolitik ini penting, karena tren perubahan geopolitik global, sangat berkaitan dan mempengaruhi kondisi ketahanan nasional suatu bangsa. Apalagi, kini banyak pergeseran dan perubahan terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam satu dekade terakhir, berbagai perubahan penting terjadi. Antara lain, krisis ekonomi dan keuangan meluas di banyak negara, populisme merebak, melemahnya peran lembaga-lembaga internasional, sampai meningkatnya aksi teror dan radikalisme.

Melalui Jakarta Geopolitical Forum, kami berupaya memahami dan merespon kondisi geopolitik dari beragam perspektif negara-negara yang berbeda. Harapan kami, penyelenggaraan Jakarta Geopolitical Forum serta sajian liputan penyelenggaraannya melalui majalah ini, dapat membantu menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan dunia, dalam rangka menciptakan perdamaian dan kemakmuran dunia yang lebih baik di masa depan.

Gubernur Lemhannas RI.



**Laporan Utama**

- 9 Jakarta Geopolitical Forum 2017: Merespon Tatanan Dunia Yang Berubah
- 12 Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti : Geopolitik Indonesia Lebih Mengedepankan Ideal Politik
- 14 Indonesia dan ASEAN dalam Dinamika Ekonomi Global
- 16 Peningkatan Aspek Infrastruktur
- 18 Jalan Panjang Kebangkitan Asia
- 22 Pengungsi Serta Dampaknya Bagi Dunia dan Indonesia
- 24 Perubahan Iklim Global dan dampaknya Bagi Ketahanan Negara
- 27 Transformasi Terorisme

**Hot Issue**

- 30 Layanan Kesehatan di Australia Terbaik Kedua di Dunia
- 32 Putin: 755 Staf Diplomatik AS Harus Angkat Kaki Sebelum September
- 33 ISIS Gempur Marawi
- 34 Perancis menyambut Presiden terbarunya, Emmanuel Macron
- 35 Beda dengan Trump, Dubes AS Puji Kepemimpinan Sadiq Khan

**Liputan Khusus HUT Lemhannas RI**

- 36 Gubernur Lemhannas RI: Kompetisi Ideologi Mengaburkan Karakter dan Jati Diri Bangsa
- 38 Orasi Ilmiah Warnai Peringatan Ulang Tahun Lemhannas RI
- 39 Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Bung Karno di Lemhannas RI
- 40 Donor Darah Dalam Rangka HUT ke-52 Lemhannas RI
- 41 Aksi Sosial Perista Lemhannas RI untuk Negeri

**Seputar Kita**

- 44 Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Tantangan Global
- 46 Lemhannas RI Selenggarakan Seminar Parenting
- 47 Duta Besar Rusia Temui Gubernur Lemhannas RI
- 48 Kunjungan Duta Besar Fiji ke Lemhannas RI
- 49 *Training of Trainers* Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Profesi Pendidik di Bandung

**Suara Alumni**

- 50 Prastiyo Diatmono (Alumni Lemhannas RI) Lemhannas RI sebagai Lembaga Pembentuk Karakter Pemimpin Nasional

**Profil**

- 51 Sukendra Martha (Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri Lemhannas RI) Pakar Geografi, Penulis Buku Humor
- 53 Arrienda Rizky (Staf Deputi Pendidikan Lemhannas RI) Penerjemah yang Gemar Mengasah Diri

**Sosok**

- 54 Susi Pudjiastuti, Menteri sarat prestasi dari kabinet Jokowi

**Galeri**

**Intermezzo**

- 59 Tetap Prima Saat di Kantor



*Laporan Utama*

*Jakarta Geopolitical Forum 2017:  
Merespon Tatanan Dunia Yang Berubah*



*Sejarah  
Kemunculan Gagasan  
Jakarta Geopolitical  
Forum*



*Sosok  
Susi Pudjiastuti, Menteri  
Sarat Prestasi dari  
Kabinet Jokowi*

# Kemunculan Gagasan Jakarta Geopolitical Forum



Filosofi dan pemikiran tentang geopolitik Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno yang disampaikan kepada peserta Kursus Reguler Angkatan (KRA) I pada saat pidato di peresmian Lemhannas RI di Istana Negara, Jakarta pada 20 Mei 1965.

Ketika itu, Ir. Soekarno menyampaikan hal yang terkait dengan pertahanan dan geopolitik: *"Malahan pertahanan nasional hanjalah dapat sempurna semaksimum maksimumnja, djikalau kita mendasarkan pertahanan nasional itu atas pengetahuan geo-politik."*

Ir. Soekarno menilai bahwa pemahaman masyarakat tentang geopolitik dan sejarah akan menjadi modal penting dalam mengelola secara bijak terhadap dinamika

kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa keberadaan Lemhannas RI dibutuhkan sebagai pusat pendidikan dan pengkajian masalah - masalah strategis yang berkaitan pertahanan negara secara luas, termasuk menjaga keutuhan NKRI.

Kini, dinamika domestik Indonesia telah banyak menyita perhatian bersama, dan tidak bisa dipungkiri bahwa dinamika geopolitik global pun terus mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat kita saat ini dan yang akan datang. Seperti yang pernah disampaikan presiden Joko Widodo pada bulan November 2015 lalu di hadapan peserta Lemhannas RI bahwa, dinamika di negara jauh sekalipun akan berdampak bagi Indonesia, dan inilah geopolitik.

Dinamika global kini terus berubah, namun tidak banyak orang yang ingin memahami makna perubahan tersebut meski mengetahui apa saja perubahan yang terjadi. Kemudian penafsiran seperti apa yang seharusnya dipahami jika dihadapkan dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Kini pemahaman tersebut, tidak lagi hanya menjadi sekedar informasi, tetapi saat ini menjadi kebutuhan suatu negara untuk menjaga kepentingan nasionalnya dan juga menata hubungan dengan tatanan global yang bergejolak.

Mendasari filosofi dan pemikiran tentang geopolitik tersebut, pada tahun 2015 Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA yang kala itu masih menjabat Gubernur Lemhannas RI, memunculkan gagasan tentang penyelenggaraan sebuah forum geopolitik berskala

internasional. Namun demikian, meskipun pada April 2016 terjadi pergantian Gubernur Lemhannas RI dari Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA. kepada Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, perencanaan Jakarta Geopolitical Forum terus dimatangkan.

Forum geopolitik “Jakarta Geopolitical Forum” yang digagas tersebut awalnya sempat direncanakan antara bulan September sampai dengan November 2016, namun karena beberapa hal mendasar menjadi hambatan maka penyelenggaraan forum geopolitik tersebut mengalami penundaan. Dalam perjalanannya, pada bulan November 2016 perencanaan forum geopolitik kembali dimatangkan dan direncanakan pada bulan Mei 2017 sekaligus menjadi salah satu rangkaian kegiatan HUT ke - 52 Lemhannas RI.

#### **Pematangan Rencana Jakarta Geopolitical Forum**

Kamis, 10 November 2016 Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djalal W. Marseno, M.Agr. menginisiasi diskusi yang membahas perencanaan Jakarta Geopolitical Forum dibawah pimpinan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Berikut peserta yang hadir pada kegiatan diskusi tersebut adalah:

- 1) Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M.
- 2) Sestama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi.
- 3) Pakar Politik dan Ekonomi Prof. Bambang Kesowo, S.H., L.L.M.
- 4) Pakar Politik dan Ekonomi Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Ph.D.
- 5) Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Djalal W. Marseno, M.Agr.
- 6) Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi Lemhannas RI Mayjen TNI Sunindyo.
- 7) Tenaga Profesional Bidang Ekonomi dan Strategi Lemhannas RI Dr. Rosita S. Noer, MA.
- 8) Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Hubungan



- Internasional Lemhannas RI.
- 9) Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, S.IP, M.Sc., Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Sosial Budaya Lemhannas RI.
- 10) Drs. Chandra Manan Mangan, M.Sc., Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ilpengtek Lemhannas RI.
- 11) Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc., Karo Humas Settama Lemhannas RI

Dalam diskusi tersebut dibahas terkait dengan lingkup kegiatan Jakarta Geopolitical Forum yang menjadi ajang para ahli geopolitik untuk menuangkan gagasannya, pengetahuan, serta pengalamannya tentang geopolitik global. Jakarta Geopolitical Forum merupakan forum akademis yang akan mendiskusikan aspek-aspek geopolitik dalam hal *global security*, *political economy*, *terrorism*, radikalisme, imigran

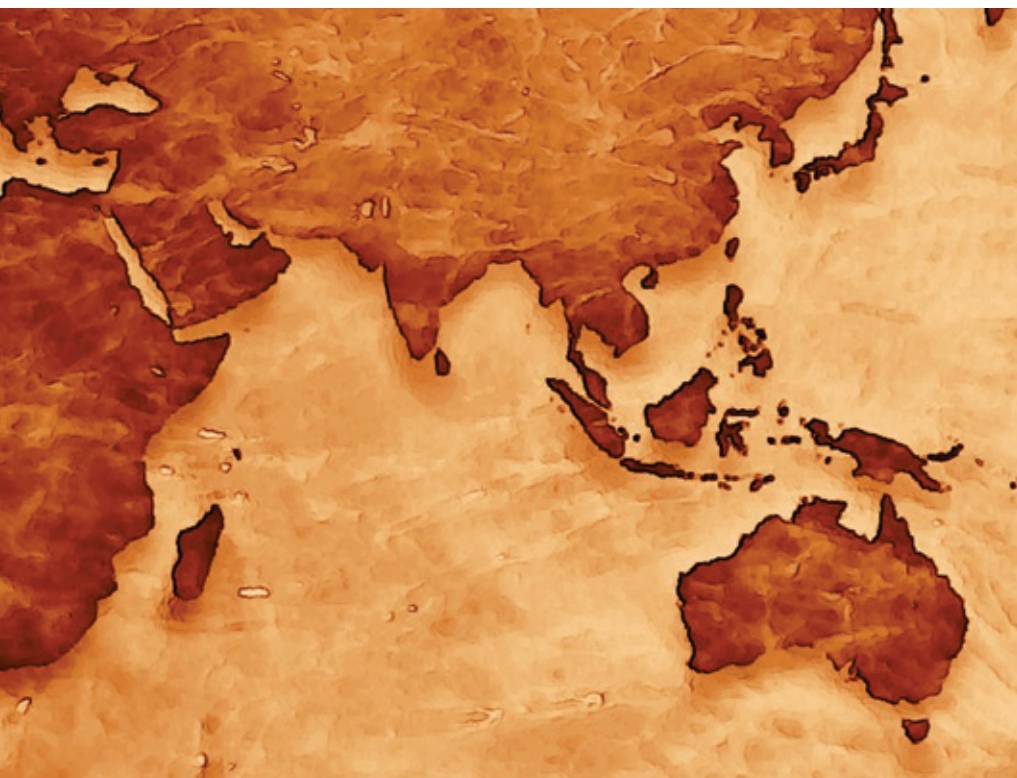
dan kondisi negaranya masing-masing.

Selain itu, kegiatan Jakarta Geopolitical Forum yang direncanakan selama tiga hari dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo tersebut, diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada seluruh peserta termasuk Lemhannas RI tentang perkembangan geopolitik global.

Hal lainnya, yaitu Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Ph.D. dan Prof. Bambang Kesowo, S.H., L.L.M yang menyampaikan komitmennya untuk terlibat dalam merancang Naskah Lemhannas yang akan disampaikan dalam Jakarta Geopolitical Forum serta waktu penyelenggaraannya yang masih tentatif seiring mengikuti dinamika situasi suksesi kepemimpinan Amerika Serikat.

Sampai Awal tahun 2017, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bersama pejabat Lemhannas lainnya, terus melakukan pertemuan secara berkala untuk terus mematangkan





AOTHYROID.ORG

penyelenggaraan Jakarta Geopolitical Forum.

#### Jakarta Geopolitical Forum: “Geopolitics in a Changing World”

Dengan mengusung tema besar “Geopolitic in a Changing World”, Jakarta Geopolitical Forum diselenggarakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2017 di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat.

Penyelenggaraan Jakarta Geopolitical Forum merupakan sarana/media tukar pikiran para ahli geopolitik dari berbagai kawasan dalam rangka memahami dinamika geopolitik yang berkembang dan pengaruhnya dalam persaingan antarnegara pada satu kawasan maupun antarkawasan sehingga diharapkan akan mendapatkan rumusan teoritis dinamika geopolitik kawasan maupun global yang mempengaruhi eksistensi dan kepentingan nasional setiap negara.

Penyelenggaraan yang diinisiasi Lemhannas RI dan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, meli-

batkan perguruan-perguruan tinggi, para akademisi dan pakar geopolitik. Jakarta Geopolitical Forum ini membahas enam sub-topik yaitu:

- 1) *The Geopolitical overview,*
- 2) *Global peace and security ,*
- 3) *Developments in the global economy,*
- 4) *Extremism, radicalism and terrorism,*
- 5) *The Environment and climate change.*
- 6) *Migrant and refugees.*

Forum dialog yang dibagi dalam enam *plenary session* menghadirkan 21 pembicara dari 14 negara. Berikut pembicara yang hadir yaitu:

- 1) Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph.D. (Indonesia)
- 2) Dr. Ernest Bower (Amerika Serikat).
- 3) Dr. Satoru Mori (Jepang).
- 4) Mr. Yang Yi (Tiongkok).
- 5) Dr. Oleg N. Barabanov (Russia).
- 6) Dr. Alan Dupont (Australia).
- 7) Mr. Kevin G. Nealer (Amerika Serikat).
- 8) Dr. M. Chatib Basri (Indonesia).
- 9) Dr. Danny Quah (Singapura).
- 10) Dr. Kirsten Schulze (Inggris).
- 11) Mr. Rüdiger Lohlker (Austria).

- 12) Brigadier General Eddy Hartono (Indonesia).
- 13) Dr. Lina Khatib (Inggris).
- 14) Mr. Mohamed Aboelfadl (Mesir).
- 15) Dr. Leonard Edwards (Kanada)
- 16) Dr. Arif Havas Oegroseno (Indonesia).
- 17) Dr. Nicolas Regaud (Perancis).
- 18) Ir. Sarwono Kusumaatmadja (Indonesia).
- 19) Prof. Dr. Nursin Ateşoğlu Güney (Turki).
- 20) Mr. Alistair Boulton (PBB).

Sementara peserta yang hadir pada Jakarta Geopolitical Forum mencapai 356 orang pada hari pertama dan 290 orang pada hari kedua. Peserta yang hadir terdiri dari :

- 1) *Speakers* dan Moderator
- 2) Kedutaan Besar Peserta PPR, Pembicara dan ASEAN
- 3) Lembaga Tinggi Negara
- 4) Kementerian/LPKN
- 5) Gubernur Provinsi
- 6) TNI/POLRI
- 7) Dewan Ekonomi
- 8) Lembaga *think tank* dalam dan luar negeri
- 9) Perguruan tinggi dalam dan luar negeri
- 10) Kantor berita dalam dan luar negeri
- 11) Media massa dan elektronik dalam dan Luar Negeri
- 12) Partisipan
- 13) BUMN/swasta
- 14) IKAL
- 15) Lemhannas RI
- 16) Mantan Gubernur/Wakil Gubernur
- 17) Perwakilan peserta PPR 56 (30 orang pada hari pertama dan 50 orang pada hari kedua *Plenary Session*)
- 18) Lain-Lain.

Forum akademis ini menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah terkait rumusan dinamika dan kecenderungan geopolitik kontemporer dalam lingkup regional maupun global dan pengaruhnya bagi kepentingan nasional setiap negara, utamanya dalam memperkokoh ketahanan nasional Indonesia yang selanjutnya akan tersusun rumusan *grand design* kebijakan dan strategi pembangunan nasional Indonesia jangka menengah dan jangka panjang. ● (EH/NM)

# Geopolitics in a Changing World 2017



***Jakarta Geopolitical Forum 2017***

*Merespon Tatanan Dunia yang Berubah*

# Jakarta Geopolitical Forum 2017: Merespon Tatanan Dunia Yang Berubah

oleh:

**Dr. Rosita S. Noer**

Chairperson Jakarta Geopolitical Forum



**D**unia kini sedang menghadapi perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semakin beragam dan kompleksnya tantangan keamanan kini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan antar bangsa. Fenomena ini mengarah pada “*new world disorder*”, dunia baru yang tidak tertata. Melemahnya peran lembaga internasional, bangkitnya politik identitas dan nasionalisme, meningkatnya aksi

radikalisme dan terorisme, dorongan anti-globalisasi, disintegrasi regional, krisis kemanusiaan dan gangguan iklim merupakan karakteristik yang menunjukkan gejala perubahan tatanan dunia. Bukan mengarah kepada tatanan dunia baru (*new world order*), melainkan dunia baru yang tidak tertata (*new world disorder*) yang terfragmentasi dan sarat kompetisi. Karakteristik perubahan tatanan dunia ini diakselerasi dengan pesatnya perkembangan teknologi

informasi dan perubahan media massa yang luar biasa.

Negara-negara kini berusaha keras untuk memahami fenomena yang terjadi dengan mencari dan merasionalisasi di balik dorongan-dorongan perubahan yang ada. Sebuah tindakan wajar bagi setiap negara untuk menafsirkan ulang dan menyesuaikan kebijakannya masing-masing untuk dapat beradaptasi menghadapi tantangan tatanan dunia yang berubah dan melakukan tindakan yang seharusnya. Berikut hal-hal yang patut menjadi perhatian kita dalam kondisi tatanan dunia yang saat ini sedang bertransformasi.

- Dunia internasional perlu untuk mengidentifikasi kembali musuh bersama yang baru dalam keamanan internasional dan mempunyai kajian menyeluruh bagaimana operasi musuh bersama ini. Tantangan baru ini membutuhkan sebuah pendekatan baru yang mengartikulasikan prinsip-prinsip konflik, konsep keamanan (termasuk konsep ketahanan pangan dan keamanan energi), doktrin perang yang juga meliputi dampak perang ekonomi, serta aspek pertahanan dalam perlindungan sumber daya alam dan perubahan iklim.
- Kompetisi politik akan terus membayangi dan mempersulit dinamika internasional dan regional. Pada tingkat regional, pergeseran politik internasional mengubah Asia Pasifik dan Timur Tengah, menjadi pusat kekuatan dunia, dalam politik maupun ekonomi akibat adanya jenis ancaman baru oleh aktor non negara. Sampai batas tertentu, pergeseran kekuatan ini menciptakan rasa ketidakpercayaan diantara negara-





negara yang terlibat.

- Masalah Laut China Selatan dan nuklir di Semenanjung Korea perlu ditangani secara damai oleh pihak-pihak yang terlibat. Negara-negara luar yang selama ini terlibat dalam konflik Laut China Selatan, terutama negara-negara besar, didesak untuk menghormati *code of conduct* dan UNCLOS. Sementara itu, pembicaraan Enam Pihak (*Six-Party Talks*) yang selama ini melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Jepang perlu untuk ditinjau ulang untuk memberikan peluang cara pandang baru dalam penyelesaian konflik di Semenanjung Korea.

Dalam bidang ekonomi, komunitas internasional cenderung melihat tren yang kontradiktif. Sementara kebijakan nasional memprovokasi disintegrasi ekonomi di beberapa belahan dunia, justru inisiatif baru muncul dengan mempromosikan kerja sama dan kolaborasi yang lebih kuat, seperti *Belt and Road Initiative*.

- Berbagai peristiwa, terutama di Timur Tengah, memberikan indikasi bahwa

bahkan negara-negara besar dan kekuatan kawasan gagal menghadapi kemunculan aksi ekstremisme dan terorisme kelompok agama radikal seperti ISIS. Situasi ini semakin mengkhawatirkan dengan menyebarnya pengaruh kelompok ini ke kawasan lain. Hanya dengan upaya kerja sama dan kolaborasi, negara-negara dapat melawan tren pengaruh kelompok ini dan membasmi terorisme.

- Lingkungan dan perubahan iklim menjadi isu wajib dalam diskursus geopolitik saat ini. Ketika dunia sedang peduli akan kebutuhan untuk melindungi dan memelihara lingkungan, beberapa negara justru memanfaatkan hal tersebut untuk tujuan yang berbeda. Negara-negara di dunia harus mempunyai tekad bersama untuk memperkuat instrumen hukum internasional dan bertindak secara terpadu untuk mengurangi dampak perubahan iklim, termasuk dengan memanfaatkan kearifan lokal masing-masing negara.
- Situasi global semakin mengkhawatirkan akibat konflik berkepanjangan

yang menciptakan adanya pengungsi besar-besaran yang diperumit dengan adanya kerancuan antara teroris dan pengungsi. Beberapa negara secara sukarela menerima para pengungsi atas dasar kemanusiaan, tetapi ada juga negara menolak. Namun, tetap perlu diapresiasi adanya pertanda positif bahwa banyak negara masih berkomitmen untuk menghormati, menegakkan prinsip-prinsip *non refoulement*, dan menerapkan standar perlakuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terkait hal ini, inisiatif kawasan sangat dihargai.

Gagasan yang disampaikan dan disarikan dari forum dan dialog selama dua hari penyelenggaraan Jakarta Geopolitical Forum 2017 secara khusus menunjukkan adanya kebutuhan mendalam untuk bertukar pikiran dan pengalaman terbaik, serta berbagi pengalaman atau strategi dari berbagai pihak. Dalam forum ini, muncul sebuah rasa dan keinginan bersama untuk membuka pintu dialog dan pertukaran gagasan tentang dinamika geopolitik. Untuk tujuan tersebut, Indonesia, khususnya Lemhannas RI, siap untuk menawarkan ruang dialog dan pertukaran gagasan. ● (EH)

*Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti*

# *Geopolitik Indonesia Lebih Mengedepankan Ideal Politik*



**Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti,**  
Guru Besar Emeritus Ekonomi  
Universitas Indonesia

Sejumlah polemik muncul ketika Maroef Sjamsoeddin (2015-2016) dan Cheppy Hakim (2016) menduduki kursi direktur utama PT Freeport Indonesia. Banyak mengkritik mengapa Freeport memilih mantan personil militer menjadi direktur utama dibandingkan sipil atau profesional. Hingga Ketua Komnas HAM Natalius Pigai menyangka pemerintah masih mengedepankan pendekatan militer dalam menangani persoalan di Papua dan hal ini berpengaruh dalam penegakan HAM di sana.

Terlepas dari sangkaan tersebut, dari kaca mata global, kemungkinan pemilihan mantan personil militer menjadi dirut sebuah korporasi multinasional merupakan tren bahwa pertimbangan geopolitik semakin menentukan masa depan bisnis multinasional tersebut. Seperti dilansir *The Atlantic*, dinyatakan

bahwa muncul tren di korporasi multinasional yang mempekerjakan akademisi politik, memulai rapat direksi dengan pengarahan tentang kondisi geopolitik, dan meminta saran pada mantan diplomat, mantan petinggi intelijen, atau mantan petinggi militer terkait kebijakan strategis korporasi. Mantan jenderal dan eks direktur CIA, David Petrus pada tahun 2013 menjadi dirut institut global milik KKR (firma investasi global), yang memberikan pertimbangan terkait pengambilan keputusan investasi dalam firma tersebut. Pada tahun 2015, mantan Kepala MI6 Sir John Sawers menjadi dirut firma konsultan bernama Macro Advisory Partners. Direktur McKinsey Dominic Barton dan pendiri Eurasia Group Ian Bremmer senada menanggapi tren ini. Bahwa 3 tahun terakhir ini, korporasi industri dan bisnis benar-benar peduli dengan geopolitik terkait keputusan bisnis mereka.

Geopolitik kini tidak hanya menjadi konsumsi para politisi dan negarawan. Dunia bisnis, media massa, hingga masyarakat awam kini meleak geopolitik. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi sangat berperan dalam hal ini. Tidak mengherankan jika geopolitik dunia pun kini menjadi perhatian khalayak ketika terjadi berbagai peristiwa internasional yang mempengaruhi tatanan dunia. Geopolitik kini menjadi kepentingan siapa saja. Karena masa depan tatanan dunia, berpengaruh pada masa depan khalayak.

Mengawali sesi dalam forum Jakarta Geopolitical Forum 2017 (JGF 2017), Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti yang memaparkan *Geopolitics in a Changing World: An Indonesia Perspective* berujar, “Sejarah membuktikan, kejadian tertentu

yang mempunyai potensi besar telah mengubah lintasan masa lalu ke arah masa depan yang tidak pasti dan tidak seorang pun tahu. Inilah tantangan yang dihadapi oleh semua negara di dunia sekarang ini. Baik negara kuat, negara lemah, negara maju atau negara berkembang sedang menghadapi masalah dengan berbagai kemungkinan”.

Inilah yang sedang kita hadapi bersama. Sebuah ketidakpastian dengan berbagai kemungkinan masa depan tatanan dunia setelah selama hampir satu abad (sejak Perang Dunia II) berada di bawah naungan Dewan Keamanan PBB dan sistem Bretton Woods. “Apakah akan bergerak ke arah pertumbuhan dan stabilitas yang terjamin atau kondisi stagnasi dan instabilitas, atau lebih buruk seperti kemerosotan menjadi negara gagal,” imbuh Dorodjatun dalam paparannya.

## **Turbulensi Geopolitik Global**

Tatanan dunia berada dalam proses transformasi. Menurut Dorodjatun yang juga menjadi dewan pengarah JGF 2017, proses transformasi ini akan memakan waktu yang sangat lama, ditandai dengan berbagai peristiwa yang mengusik tatanan dunia satu dekade belakangan ini.

Jenis dan karakteristik ancaman keamanan telah berubah. Aktor non negara yang membangun “imperium” lintas batas negara yang berwujud terorisme. Pengeboman kini tidak hanya terjadi di wilayah konflik, tetapi juga di kota-kota besar dunia yang menjadi simbol kemakmuran.

Sementara itu peran institusi internasional melemah. Dewan Keamanan PBB, yang selama ini berperan dalam menjaga stabilitas dunia, tidak mampu menghentikan Rusia yang melakukan

aneksasi di Krimea. Institusi keuangan internasional, *International Monetary Fund* (IMF), yang sedang berbenah melakukan reformasi terancam gagal karena tidak ada dukungan dari pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai patron.

Belum lagi pergantian kepemimpinan di sejumlah negara-negara besar (*major powers*) mengakibatkan adanya perubahan kebijakan luar negeri yang cenderung mengarah ke isolasionis dan mengabaikan sejumlah kesepakatan internasional yang telah dibentuk sebelumnya. Donald Trump yang membatalkan *Trans Pacific Partnership* (TPP) sekaligus menarik AS untuk lebih *inward looking*, keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit), Korea Utara yang semakin berani melakukan uji coba nuklir, serta Tiongkok yang gencar membuat manuver terkait Laut China Selatan. Ke semua itu kini membuat semua sulit diprediksi.

### Sikap Indonesia

Meskipun menghadapi masa depan yang tidak pasti, setidaknya negara-negara dapat membuat skenario masa depan tatanan dunia. Pergeseran geopolitik global yang mengarah pada perubahan tatanan dunia perlu disikapi secara cermat. Setiap negara masih meraba dan mencoba meramu kebijakan politiknya, menanggapi ketidakpastian yang terjadi di tatanan dunia. Bagaimana dengan Indonesia?

Prof. Dorodjatun mengungkapkan, Indonesia mempunyai sudut pandang dan pendekatan politik luar negeri sendiri. Tentu hal ini tidak terlepas dari sejarah pembentukan bangsa ini, falsafah dasar negara, dan konstitusi yang mendasarinya. “Pembentukan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara berdaulat dengan masyarakat multi etnis dan multi agama yang tinggal di puluhan pulau berbeda menyiratkan sebuah kemiripan imajinasi geopolitik telah ada di Nusantara sejak lama,” tegas Dorodjatun.

Pancasila dan pembukaan UUD 1945 menjadi dasar penting kebijakan politik luar negeri Indonesia. Prinsip-prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama dan kemanusiaan melahirkan politik luar negeri bebas aktif yang

membuat Indonesia dapat bergerak bebas tanpa aliansi. “Bebas aktif bukan berarti netral, karena Indonesia tidak netral terhadap segala bentuk penindasan dan penjajahan,” imbuhnya.

Dorodjatun juga menyampaikan bahwa Indonesia tidak pernah bertindak sebagai negara besar (*major powers*) bahkan di tingkat kawasan dan sikap Indonesia yang mengedepankan norma dalam geopolitiknya.

Profesor yang pernah menjabat Menko Perekonomian RI ini menambahkan, “Kondisi geografis Indonesia yang sangat



*Bebas aktif bukan berarti netral, karena Indonesia tidak netral terhadap segala bentuk penindasan dan penjajahan*

terbuka bagi pihak asing dan demografi penduduknya yang besar membuat Indonesia rawan akan tantangan, ancaman, dan bahaya dari luar yang bersembunyi di balik primodialisme atau ideologi modern. Politik luar negeri Indonesia pun lebih akomodatif, persuasif, dan adaptif karena hal itu. Pilihan sikap geopolitik Indonesia lebih mengedepankan idealpolitik yaitu bebas aktif daripada realpolitik, serta aktif berpartisipasi dalam memelihara perdamaian dan kestabilan dunia.”

Idealpolitik Indonesia –yaitu prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang berlandaskan pada falsafah negara (Pancasila) dan kepentingan nasional tanpa mengabaikan perdamaian dunia –selalu menjadi pedoman dalam melakukan interaksi dengan negara lain dalam forum bilateral, regional, maupun internasional. Karena menurut Indonesia, *real politik* –landasan politik luar negeri yang berdasarkan pertimbangan keadaan dan faktor yang ada, bukan karena gagasan ideologis eksplisit atau premis moral dan etis– justru akan memperuncing keadaan

dunia sekarang ini yang tengah berada pada ketidakpastian.

“Sejarah telah mencatat, ‘pemaksaan’ *realpolitik* yang pragmatis menyebabkan disintegrasi regional secara total. Kolonialisme Barat, kemudian imperialisme telah mengarahkan dunia ke arah konflik, bahkan perang dunia kala itu,” imbuh Dorodjatun. Situasi dunia sekarang ini kemungkinan terjadi akibat konsekuensi *realpolitik* yang ingin diraih oleh negara besar dan negara maju yang berkonflik dengan idealpolitik negara berkembang dan negara lemah. Memang akan selalu muncul konflik dalam pendekatan tatanan dunia antara keseimbangan kekuatan (*balance of power, realpolitik-red*) dan pertimbangan etika moral (*idealpolitik-red*).

Ketika tatanan dunia mengalami turbulensi, perbedaan antar negara akan berlanjut pada isu yang lebih luas. Akan terjadi perselisihan, friksi, bahkan konflik. Menjadi realistis untuk mengakui perbedaan-perbedaan yang sebagai fakta yang harus dihormati bersama, sebagai dasar saling percaya, sehingga terbuka untuk membangun kepercayaan dalam negosiasi. “Akan lebih baik negara-negara yang berinteraksi memberikan prioritas dalam hal yang bisa diraih (*achievable*), bukan hal yang diinginkan (*desirables*), tanpa mengabaikan kepentingan nasional masing-masing tentunya,” saran Dorodjatun.

Seperti disampaikan Dorodjatun, pendekatan berdiplomasi yang selama ini dilakukan Indonesia dapat menjadi alternatif yang menjembatani apapun proses transformasi yang terjadi yang mengarah ke berbagai kemungkinan bentuk tatanan dunia ke depan. “Seperti yang Indonesia lakukan, komunikasi terbuka dengan berbagai pertimbangan harus tetap dipelihara. Tidak ada pembedaan perlakuan dalam diplomasi bilateral, regional, maupun multilateral,” tegas Dorodjatun. Ia mengutip perkataan mantan Menlu Indonesia Ali Alatas: “selalu upayakan untuk mencapai pemahaman bersama di level apapun dan kondisi apapun, dan jangan paksa siapapun untuk memilih”. ●

(EH/NM)



# Indonesia dan ASEAN Dalam Dinamika Ekonomi Global



**Dr. M. Chatib Basri,**  
Menteri Keuangan Republik Indonesia (periode 2013-2014)

IIF.CO.ID

**G**lobalisasi telah berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dunia, baik dalam aspek positif dan negatif. Namun demikian, dampak positif globalisasi ekonomi belum berdampak langsung terhadap masyarakat. Globalisasi merupakan fenomena dimana perdagangan internasional mempengaruhi kehidupan suatu bangsa dalam aspek yang kompleks dan multidimensional, baik dalam aspek ekonomi, politik dan struktur sosial, termasuk mempengaruhi interaksi ekonomi baik dalam level nasional, regional, maupun lokal. Untuk itu dapat dipahami bahwa dalam perkembangannya, perkembangan ekonomi di satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lain, negara,

bahkan dalam level global. Dalam Jakarta Geopolitical Forum 2017 pada 18-20 Mei 2017 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI di Hotel Borobudur, Jakarta diangkat diskusi mengenai “Developments in the Global Economy” dengan menghadirkan para ahli ekonomi politik global yaitu Dr. M. Chatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia (2013-2014) dan Danny Quah, Ph.D. ahli ekonomi dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Saat ini, negara-negara di dunia tengah mengalami situasi *New Normal Economy*. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Chatib Basri, setelah Eropa dan Tiongkok, ASEAN juga akan menghadapi fenomena *New Normal Economy*. “Istilah *New Normal Economy* merujuk pada situasi ketidakpastian ekonomi dan ancaman krisis, akan tetapi hal tersebut menjadi

sesuatu pemandangan yang lumrah dan siklus krisis yang cepat menjadi situasi yang biasa,” kata Chatib Basri.

Melihat pada kondisi perekonomian global tersebut, Chatib Basri menyebutkan bahwa negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia, perlu mewaspadai ketidakpastian kondisi ekonomi global. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa istilah *New Normal Economy* pernah disebutkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk merujuk situasi terkini negara Tiongkok dimana negara tersebut mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi (dari sebelumnya 9 persen pada 2012, menjadi 7.7 persen pada 2012-2013, kemudian menjadi rata-rata 7.4 persen pada 2015, dan diperkirakan menurun 7 sampai 5 persen hingga saat ini).

Menurut Chatib Basri, fenomena *New Normal Economy* dihadapi beberapa negara barat pasca krisis finansial 2007-2008, serta kondisi ekonomi dunia pasca resesi ekonomi 2008-2012. Belakangan ini fenomena tersebut mulai dialami oleh Tiongkok. “Tiongkok baru mulai mengalami fenomena ini tahun 2012. Berbeda dengan Eropa yang sudah mengalami fenomena *New Normal Economy* sejak tahun 2008,” kata Basri menambahkan.

Ia memaparkan bahwa fenomena *New Normal Economy* di Tiongkok mulai berkembang karena beberapa hal, yaitu kesuksesan perdagangan dan industrialisasi Asia Timur, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), meningkatnya nasionalisme ekonomi, kebijakan proteksionis di Era Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta kebijakan ekspansi dan normalisasi kebijakan moneter dilakukan oleh negara tersebut.

Keadaan tersebut juga sesuai dengan



sebagaimana yang diutarakan oleh Danny Quah, pengamat ekonomi asal Singapura. Ia mengatakan bahwa munculnya fenomena *New Normal Economy* ini membuat banyak orang memiliki sikap pesimis terhadap perekonomian dunia. “Fenomena itu tidak dapat dipungkiri lagi akan merambah ASEAN karena



**Danny Quah Ph.D.**  
Ahli Ekonomi Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura

kondisi ekonomi dunia setelah krisis finansial 2008 belum benar-benar pulih,” ujar Quah. Ia menjelaskan hal tersebut terjadi karena Amerika Serikat dinilainya tetap akan memegang peranan

dominan di kawasan Asia Pasifik. Di satu sisi, cadangan valuta asing Tiongkok sudah mulai menurun dan fenomena ini berlanjut sampai beberapa bulan lalu. “Tiongkok sebagai pemimpin ekonomi Asia membawa hasil tidak baik bagi tetangga-tetangganya,” ujar Quah. Di satu sisi menurut Quah kepemimpinan Amerika Serikat di kawasan Asia akan tetap eksis.

#### **Tetap Bertahan dalam Kondisi Sulit**

Fenomena dan dampak globalisasi dalam perekonomian dunia adalah suatu keniscayaan, untuk itu pengaruh globalisasi bagi negara-negara Asia Tenggara maupun Indonesia juga merupakan keniscayaan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk tetap bertahan dalam dinamika ekonomi global. Chatib Basri menjelaskan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dapat bertahan dalam kondisi “*New Normal Economy*” yaitu dukungan politik dan jaminan kemudahan dalam aspek ekonomi, menyediakan ruang untuk kebijakan nasional, serta fokus pada peningkatan ekonomi makro.

Chatib Basri memprediksi bahwa perekonomian Asia akan terus meningkat, akan tetapi peningkatan

ekonomi tersebut juga perlu didukung dan dimanfaatkan oleh perekonomian Asia Tenggara yang kuat. “Beberapa usaha yang perlu dilakukan agar negara dapat bertahan dalam globalisasi ekonomi adalah dengan meningkatkan stabilitas kebijakan makro-ekonomi negara, aktif dalam perdagangan terbuka dan membuka investasi seluas-luasnya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menciptakan pemerintahan yang stabil,” Chatib Basri menjelaskan. Dalam aspek keterbukaan perdagangan, yang dapat dilakukan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara adalah menguatkan perdagangan dalam *level* unilateral, multilateral, memanfaatkan *free trade area*, atau kombinasi dari kesemuanya.

Menanggapi situasi tersebut, Danny Quah menambahkan bahwa Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pada kegiatan ekspor ke Tiongkok, justru harus secepatnya mengambil manfaat sebesar-besarnya dari Tiongkok. “Indonesia perlu untuk mengambil untung dari Tiongkok, bukan hanya menjual bahan mentah seperti yang terjadi selama ini agar tidak terlalu terdampak fenomena *New Normal Economy* yang akan dihadapi ke depan di kawasan ASEAN,” ujar Chatib. ●

(EH/NM)

# Peningkatan Aspek Infrastruktur



PRESIDENRI.GO.ID

**G**lobalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah memberikan dampak yang luas bagi perkembangan ekonomi dan politik dunia internasional. Para ekonom dunia telah memprediksi pergeseran perekonomian dunia menuju Asia dan peningkatan ekonomi yang stabil di kawasan Asia—dalam hal ini Tiongkok—. Efek domino ekonomi Tiongkok juga berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara di kawasan sekelilingnya, misalnya Vietnam, Laos, dan Filipina dengan pertumbuhan GDP rata-rata 6 persen. Meskipun pertumbuhan tersebut cukup tinggi, tapi nilai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk itu, pertumbuhan tersebut juga harus diimbangi dengan pertumbuhan infrastruktur yang baik sebagai pendukung pertumbuhan perekonomian yang baik. Dalam aspek pertumbuhan infrastruktur, ASEAN memiliki tingkat pertumbuhan infrastruktur yang rendah yaitu menempati indeks 40,41 dari 100

(Singapura menempati posisi tertinggi yaitu dengan indeks 76,43) dengan pertumbuhan tertinggi yaitu di Vietnam. Sementara Indonesia, menempati posisi pertumbuhan infrastruktur ke-5 dari enam negara ASEAN yang diteliti, dan menempati posisi di belakang Vietnam.

Lemahnya kondisi infrastruktur negara ini tercermin dari laporan *The Global Competitiveness Index 2015-2016* dari *World Economic Forum*. Dari hasil penilaian terhadap 144 negara, infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 62. Untuk kawasan ASEAN, peringkat tersebut masih di bawah Singapura (peringkat 2), Malaysia (24), dan Thailand (44).

## **Pertumbuhan Infrastruktur Rendah, Daya Saing Rendah**

Semenjak diterpa badai krisis ekonomi tahun 1998 lalu, pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat. Akibat dari kondisi itu, pertumbuhan jumlah penduduk

di negeri ini menjadi jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan infrastrukturnya. Infrastruktur yang belum terbangun secara menyeluruh ini menyebabkan tingginya biaya pengeluaran, biaya logistik dari perkotaan ke pedesaan dan sebaliknya. Pelayanan publik ke berbagai wilayah juga menjadi rendah.

Hal itu juga yang menyebabkan daya saing Indonesia cukup terpuruk dan mendapat peringkat rendah dari berbagai lembaga pemeringkat dunia. “Dari sisi *competitiveness* (daya saing), kita tahu bahwa infrastruktur adalah salah satu faktor yang menempatkan Indonesia pada ranking rendah, karena belum terbangun secara efisien. Ini yang menyebabkan tingginya biaya pengeluaran, baik dari perusahaan atau masyarakat akibat belum tersedianya infrastruktur di perkotaan atau pedesaan,” kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, di Hotel Indonesia Kempinski, Selasa (4/4).

Karena itu, pemerintahan Jokowi kini berfokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Menurut Sri Mulyani, infrastruktur saat ini mendapatkan alokasi anggaran prioritas pemerintah. Dalam APBN 2017, pemerintah mengalokasikan Rp 380 triliun atau 19 persen alokasi APBN 2017 untuk infrastruktur. Nilai tersebut hanya sedikit di bawah alokasi pendidikan dalam APBN 2017 senilai Rp 407 triliun atau 20 persen, sesuai amanat undang-undang.

Meski sudah mendapat alokasi yang tinggi, nilai itu masih sangat kurang dibandingkan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tengah direncanakan pemerintah. Sebab, dalam RPJMN 2015-2019, kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur selama 5 tahun mencapai Rp 4.700 triliun. Sementara, kemampuan APBN dan



APBD hanya 33 persen atau Rp 1.551 triliun, serta perusahaan BUMN 25 persen, atau Rp 1.175 triliun. Sisanya, sebesar 42 persen atau Rp 1.974 triliun akan berasal dari swasta.

Menkeu Sri Mulyani menambahkan, pembangunan infrastruktur merupakan bentuk investasi pemerintah supaya Indonesia memiliki daya tahan dan juga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, meningkatkan produktivitas. Di luar pulau Jawa, pembangunan infrastruktur ini ditujukan untuk pembangunan pelabuhan baru,

kebutuhan akan terjadi seperti yang tengah dilakukan dengan Trans Papua. Dengan begitu, diharap secara bertahap Indonesia akan mengejar ketertinggalan sarana infrastrukturnya, sehingga daya saingnya pun meningkat.

Saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur, akan tetapi Aviliani menjelaskan bahwa APBN pemerintah tidak memiliki kemampuan sepenuhnya untuk membangun dengan dana hampir sebesar 4.700 triliun rupiah. Karena adanya keterbatasan itu, maka menurut Aviliani, pemerintah

harus memperhatikan beberapa hal penting terkait pembangunan infrastruktur ini. Yang pertama, pemerintah harus membuat skala prioritas, artinya penggunaan dana-dananya itu harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan *public goods*. Yang kedua, pemerintah perlu menggandeng pihak swasta untuk membantu menutupi kekurangan alokasi dana dari APBN.

Ada juga model kerja sama lain yang bisa ditawarkan kepada swasta. Yaitu, menyewakan lahan dalam jangka panjang, namun investor yang menyewa itu harus membangun infrastruktur wilayah itu. Negeri ini memiliki banyak lahan yang luas di luar pulau Jawa. Misalkan swasta menyewa satu pulau selama 50 tahun. Kemudian, di situlah dia harus membangun infrastruktur. "Sehingga pemerintah tidak perlu lagi keluar uang, tidak perlu membayar utang. Tetapi, syarat-syaratnya kita yang menentukan, misalnya ia harus membangun apa saja di sana, harus mempekerjakan orang Indonesia berapa banyak misalnya," papar Aviliani.

Aviliani menambahkan, selain masalah dana swasta, hal ketiga yang harus diperhatikan adalah bahwa

pemerintah juga perlu memprioritaskan pada proyek infrastruktur yang dapat memberikan *multiplier effect* yang tinggi. Contohnya, pemerintah membangun wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini tentu sangat bagus. Namun, membangun dari timur ini seringkali ongkosnya mahal, karena tidak langsung membuat *multiplier effect* ekonomi ekonomi yang cepat.

Jika harus mengurangi anggaran pemerintah, kata Aviliani, maka proyek itu harus melihat *multiplier effect* ekonomi yang tadi, kalau *multiplier effect*-nya rendah sebaiknya harus di tunda dahulu. "Jika tidak ada prioritas, saya sedikit takut kita ingin membangun secepat-cepatnya sebanyak-banyaknya, lalu utang kita menumpuk tapi akhirnya tidak bisa *multiplier*, lalu akhirnya kita tidak bisa membayar utang. Itu yang harus dijaga," jelas Aviliani.

Selain itu, Aviliani juga menekankan perlunya pemerintah memperhatikan agar hasil pembangunan infrastruktur bisa dinikmati tidak hanya oleh kalangan atas dan industri besar saja. Masyarakat kelas bawah seringkali tidak ikut menikmati infrastruktur itu. Ia mencontohkan, pembangunan jalan tol, jalan layang, yang menikmati hanyalah masyarakat menengah atas, dan pelaku industri besar. Infrastruktur jalan-jalan besar memang sudah mulai sampai ke wilayah Indonesia Timur, namun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat kecil di sana seringkali terlewatkan, dan belum tersedia. Misalnya, jalan-jalan desa yang bisa menjangkau sawah dan kebun mereka, fasilitas air bersih, irigasi dan sebagainya. Jika pembangunan infrastruktur bisa lebih berpihak pada masyarakat kelas bawah, barulah kesenjangan ekonomi bisa terhapus.

Terkait masalah ini, Aviliani berharap besar pada program dana desa yang digulirkan pemerintah. Anggaran desa sebesar Rp 1,5 miliar per desa inilah yang ia harapkan akan bisa menyeimbangkan ketersediaan infrastruktur untuk masyarakat bawah. ●

(EH/NM)



**Dr. Aviliani S.E, MSI**  
Pengamat Ekonomi

bandar udara baru dan perluasan pelabuhan lama dan bandar udara lama. Selain itu, jalan Trans Papua dan Trans Sumatera juga menjadi perhatian pokok pemerintah karena jalur tersebut merupakan jalur yang potensial untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Kedua, ekonomi daerah di mana pembangunan infrastruktur dilakukan akan merasakan dampak positif, karena adanya perputaran uang dan efek domino yang mengikutinya. Ketiga, penjualan produk-produk dan hasil bumi daerah akan mudah tersalurkan. Pelabuhan-pelabuhan kecil di tingkat kecamatan seperti di Halmahera akan menjadi tujuan para pedagang menjual produk dan hasil buminya. Keempat, isolasi daerah dapat dibuka, dan penurunan harga barang

# Jalan Panjang Kebangkitan Asia

**A**sia 2050 adalah abad milik Asia (*Asian Century*). Itulah tajuk publikasi Asian Development Bank (ADB) 2011 lalu tentang proyeksi dominasi Asia ke depan, merujuk pada tren pertumbuhan ekonomi dan demografi beberapa tahun belakangan ini. Tidak sedikit yang meragukan premis ini karena tren relokasi industri yang menurun, pasar Amerika dan Eropa yang jengah dengan impor dari Asia, budaya politik ekonomi Asia yang masih *top-down*, masalah populasi di Asia, dan ketegangan keamanan di Asia. Namun, banyak juga yang mengamini prediksi abad Asia karena sejumlah faktor politik dan ekonomi internasional yang intens akhir-akhir ini. Kolumnis *The Financial Times* Gideon Rachman menyebutnya sebagai proses *easternisasi*, sebuah tren meningkatnya kekayaan negara-negara Asia yang mentransformasi keseimbangan kekuatan internasional (*balance of power*). Menurutnya, dominasi Barat dalam politik internasional akan berakhir. Aliran kekayaan dan kekuatan politik beralih dari Barat ke Timur dan era instabilitas global akan dimulai.

Melihat tren ini, dalam salah satu sesi di Jakarta Geopolitical Forum 2017 (JGF 2017) yang diselenggarakan Mei silam, berbagai akademisi terkemuka berdialog dan berdiskusi tentang masalah stabilitas dan keamanan global.

## New World Disorder?

Alan Dupont, ahli geopolitik terkemuka Australia yang menjadi pembicara dalam forum ini melihat adanya akselerasi perubahan dalam geopolitik, ekonomi, dan teknologi yang menyebabkan terjadinya turbulensi dan ketidakpastian yang mengarah pada *new world disorder*. "*New world disorder* ini cenderung berlangsung lama dan ditandai dengan berbagai konflik, gangguan, dan naiknya tingkat



**Alan Dupont**  
Konsultan Geopolitik asal Australia,  
CEO Cognoscenti Group

ketidakstabilan," ungkap Dupont.

Muncul kekuatan baru yang menantang tatanan dunia lama. "Nilai-nilai dan kepemimpinan Barat kini ditantang oleh China, Rusia, Iran, dan Korea Utara. Belum lagi ancaman dari aktor non negara seperti Al Qaida dan ISIS. Bahkan, kita belum sepenuhnya pulih dari krisis finansial 2008 salah satu faktor yang berkontribusi atas kondisi ini," imbuh Dupont, yang juga menjadi CEO Cognoscenti Group -firma konsultan geopolitik dan keamanan di Australia.

Dalam kesempatan ini, Alan Dupont menjelaskan tatanan dunia akan cenderung bersifat multipolar. China tidak akan berkuasa, tetapi tidak juga dengan Amerika dan Rusia. Meskipun Uni Eropa terus mengalami penurunan, Amerika akan bertahan dan memperkuat pengaruhnya hingga jangka menengah. Rusia, meskipun tidak kuat secara ekonomi, terus membangun dan menunjukkan kapabilitas militernya dengan

menganeksasi Krimea dan wilayah barat Ukraina.

Menurut Dupont, sekarang ini secara kebetulan kita berada pada poin terendah rentang siklus geopolitik (100-120 tahun) dan siklus ekonomi global (40-60 tahun). Dampaknya, dunia berada pada puncak perubahan yang besar, sistem lama berada di bawah tekanan yang intens sementara sistem baru belum sepenuhnya terjadi. "Penelitian menunjukkan adanya peningkatan resiko geopolitik dua kali lipat setelah era 9/11", ujarnya dengan pasti. Belum lagi yang terjadi di Eropa. "Tidak ada yang memprediksi adanya Brexit. Hal itu benar-benar kejutan tidak hanya bagi Inggris tetapi juga masyarakat Uni Eropa. Masyarakat Perancis pun terbelah tentang Uni Eropa", tambah Dupont.

Menurut Jean-Pierre Lehmann seperti dilansir Forbes, kondisi Eropa saat ini mengkonfirmasi marginalisasi Uni Eropa di panggung dunia. Turki dan Rusia, yang berada di perbatasan Eropa dan Asia, memilih untuk berkecimpung di Asia (Asia Timur dan Tenggara). Ditambah lagi, ungkap Lehmann, politik luar negeri Donald Trump yang menyiratkan pesan kepada sekutu AS bahwa *Pax Americana* berakhir dan mereka harus lebih mandiri. Trump mengabaikan pendekatan *Wilsonian* yang menjadi dasar Amerika Serikat dalam menjalin hubungan dengan para sekutunya. Perang dingin, bukanlah Ian Bremmer dalam wawancara dengan *Bussines Insider* awal tahun ini pun mengatakan demikian. *Pax Americana* berakhir. Pada era dunia baru yang tidak tertata, Asia muncul sebagai kekuatan masa depan.

## Melemahnya Negara Adidaya

Salah satu sinyal akan pudarnya kejayaan tatanan dunia yang dipimpin oleh Amerika dan bergesernya kekuatan dunia ke Asia adalah melemahnya



COGNOSCENTI GLOBAL

Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Meskipun supremasi Amerika tidak akan pudar dalam waktu dekat, negara ini kian menunjukkan tanda-tanda melemahnya supremasi tersebut dalam tatanan politik internasional. Salah satu faktor yang berkontribusi cukup besar adalah dinamika politik dalam negeri negara adidaya tersebut.

Setelah terpilihnya taipan bisnis Amerika Donald Trump sebagai Presiden AS ke-45, arah politik luar negeri Amerika berubah dengan orientasi pembenahan ekonomi dalam negeri.

'America First' dan 'Make America Great Again' telah memenangkan Trump dalam meraih simpati pemilihnya. Filosofi Trump dalam slogan ini melihat bahwa institusi *multilateral* dan politik transnasional adalah hal yang transaksional. Tidak seperti filosofi *Wilsonian* yang memelihara tatanan dunia untuk jangka panjang dengan prinsip nilai-nilai bersama, Trump percaya politik luar negeri Amerika Serikat berlandaskan pada kepentingan nasional jangka pendek dan lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan cepat di panggung dunia.

Menurut Direktur Program Asia Tenggara CSIS Amerika Ernest Z. Bower, presiden sebelumnya, Barack

Obama, meninggalkan kondisi yang harus diperbaiki Trump. Obama aktif berpesiar menjalin kerja sama dalam perdagangan internasional dan mengabaikan keadaan domestik. "Yang tidak dilakukan dengan baik oleh Amerika adalah pemerintah tidak mensosialisasikan kepada rakyat Amerika kenapa Amerika perlu membuat perjanjian perdagangan bebas dengan 11 negara. Kenapa kita bergabung dengan East Asia Summit, kenapa memperat hubungan dengan China, Jepang, Thailand, dan Australia. Hal itu tidak dilakukan. Presiden Obama banyak berbicara dan berkunjung ke luar negeri tentang hal itu, tapi tidak di dalam negeri Amerika. Jadi banyak



**Dr. Ernest Z. Bower**  
Direktur Program Asia Tenggara,  
CSIS Amerika

rakyat Amerika yang merasa ditinggal dan merasa keheranan kenapa hal tersebut penting bagi kesehatan dan keselamatan mereka," jelas Bower dalam sesi *Global Peace and Security* di JGF 2017.

Pemerintah AS tidak melibatkan masyarakat Amerika dan menjarang aspirasi apa yang mereka mau terkait kebijakannya dalam perdagangan internasional. Akan terjadi instabilitas dan banyak kejutan jika pemerintah tidak segera menangani hal ini.

Bower menambahkan, "Trump bermasalah dalam menjaga kekuasaannya karena adanya penyelidikan antara Trump dan Russia. Hal ini memperparah ketidakpastian yang terjadi. Ditambah lagi banyak penasihat ekonomi Trump saling silang pendapat." Kondisi ini memicu Trump untuk mengubah pendekatan politik luar negeri Amerika Serikat.

Hal senada juga diungkapkan Kevin G Nealer, kepala firma konsultan bisnis internasional The Scowcroft Group pada sesi selanjutnya di JGF 2017, terkait kondisi dalam negeri Amerika Serikat. "Gaya kampanye non tradisional Trump berpengaruh pada pemerintahannya. Pemerintahan Trump tidak mempunyai kebijakan luar negeri yang komprehensif," jelas Nealer. Nealer menyatakan, gaya politik luar negeri Trump yang terlihat tidak konsisten merupakan bagian dari strategi untuk mencapai keuntungan ekonomi bagi Amerika Serikat.

"Untuk menarik perhatian konstituentnya, Trump harus membuat kebijakan dan tindakan konkret untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perdagangan. Trump telah berganti partai 8 kali dan berganti istri 3 kali tapi sudut pandanginya tentang perdagangan tidak berubah sejak tahun 2009. Ada pengaruh moderat dalam pandangan perdagangan Trump. Ia lebih baik memilih untuk bernegosiasi kembali daripada menarik diri dari NAFTA," ungkap Nealer.

Tantangan pemerintahan Trump lainnya adalah terkait *impeachment*





**Kevin G. Nealer**  
Konsultan Bisnis Internasional,  
Pemimpin Grup Scowcroft

antara Trump dan Rusia. “Pemimpin Republikan akan mengawasi apakah Trump bisa memenuhi keinginan mereka dalam hal reformasi pajak yang komprehensif. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita dapat bertahan berpihak pada Trump? Republikan akan memutuskan apakah mereka akan berpihak atau melawan Trump akhir tahun ini. Meski ada pemanggilan impeachment, kenyataannya adalah belum pernah ada Presiden yang dipecat saat partai presiden mayoritas di Kongres,” imbuh Nealer.

Dengan kondisi domestik yang masih berkecamuk hingga saat ini, Amerika Serikat nampaknya akan fokus mengatasi situasi politik dan ekonomi dalam negeri.

### Asia Pasifik Pusat Dunia Baru?

Absennya kepemimpinan Amerika Serikat di tingkat global, membuat proses easternisasi menguat. Menurut Satoru Mori, profesor di Universitas Honsei Jepang, geopolitik abad 21 adalah milik Asia. “Jepang melihat kebangkitan pembangunan geopolitik akan terjadi di kawasan Indo pasifik sebagai panggung utama. Kontribusi adanya pembukaan jalur laut dalam perdagangan seperti *China Belt and road initiative* akan mempercepat pembangunan di kawasan. Jepang juga berusaha ikut serta dalam pembangunan di kawasan dengan menawarkan strategi

membangun kawasan Indo Pacific secara keseluruhan,” ujar Mori pada sesi 2A Global Peace and Security JGF 2017.

Mori menyatakan China cukup berperan pada perkembangan geopolitik Asia Pasifik. “Selain AS, China juga mendorong insentif ekonomi. Karena adanya peluang pembangunan yang sangat besar di kawasan,” pungkask profesor dari Jepang ini. Hal senada diungkapkan Yang Yi, Sekjen The China Institute of International Studies (CIIS) Beijing,” China dan Amerika Serikat merupakan negara pertama dan kedua yang mempunyai peran besar di Asia Pasifik.”

Selain Asia Timur, kawasan Asia Tenggara yang diwadahi dalam bendera ASEAN juga memegang peranan penting di Asia Pasifik. Hampir semua negara besar menanamkan modal perekonomiannya di kawasan ASEAN, seperti China, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat. Yang Yi menyatakan, “Menjadi prioritas China untuk berpartisipasi lebih baik di ASEAN”.



**Satoru Mori**  
Profesor Universitas Honsei Jepang

“Bagi Amerika Serikat, ASEAN adalah mitra penting dalam perekonomian seperti yang diungkapkan Kevin G Nealer di JGF 2017,” Amerika Serikat memiliki 3 kali jumlah investasi yang lebih besar di Asia Tenggara daripada China.” Presiden Trump, meskipun belum melakukan lawatan ke ASEAN,

juga menyatakan bahwa ASEAN adalah mitra strategis Amerika Serikat. “Bisnis Amerika di Asia Tenggara 10 kali lipat jumlahnya jika dibanding dengan India, 3 kali lipat dari China. Trump tidak ingin hubungan dengan ASEAN terlepas. Trumps menganggap ASEAN masih penting dan ingin mengundang pemimpin ASEAN ke Washington,” tambah Ernest Z Bower pada sesi sebelumnya di JGF 2017.

Meskipun begitu, menurut Mori, karakteristik negara-negara yang kurang memiliki pemahaman bersama membuat pergeseran kekuatan ke Asia Pasifik ini dapat memicu persaingan militer pula. “China yang diuntungkan dengan situasi ini. Kenaikan ekonomi yang didahului dengan kebangkitan militer, mendorong kemajuan China dalam kepentingan keamanannya. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi China untuk unjuk kekuatannya di Asia. Akibat perilaku China yang terlihat ambisius ini, tercipta rasa ketidakpercayaan di kawasan,” jelas Mori.

China yang asertif telah membuat beberapa negara gerah. Meskipun begitu, mereka tidak mengabaikan pesona dan daya tarik China bagi perekonomiannya. Seperti yang dikatakan Bower, “Amerika ingin China secara ekonomi berhasil, dan itu bagian dari kepentingan nasional Amerika. Tetapi, beberapa kebijakan China tidak mengukung kerja sama dengan Amerika.”

Inilah problematika dan tantangan yang dimiliki oleh Asia Pasifik untuk menjadi pusat dunia yang baru. Rasa ketidakpercayaan dan belum adanya norma bersama yang disepakati membuat kawasan ini rentan konflik meskipun banyak kerja sama ekonomi yang dilakukan. Polemik Laut China Selatan kini sudah agak mereda seiring meredamnya konflik sengit China dan Vietnam. Tantangan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah Asia Pasifik adalah menyelesaikan permasalahan nuklir Korea Utara.

## Geliat Rusia

Meskipun Asia Pasifik digadang sebagai pusat dunia baru, Rusia tidak mau ketinggalan. Dr. Oleg N Barabanov, seorang akademisi dari Moscow State Institute of International Relations yang juga menjadi salah satu pembicara di JGF 2017 menyebutkan, “Kekuatan ekonomi bergeser ke Asia, normal jika Rusia ingin terlibat lebih dalam di kawasan Asia Pasifik.”

Lebih lanjut, Barabanov menyatakan bahwa China adalah mitra Rusia. “Partner kunci kita adalah China karena Rusia berbatasan wilayah dengan China sejauh 4000 km. Rusia mempunyai banyak investasi komersial dan jaringan *people to people* dengan China. Sejak tahun 2008, Rusia dan China telah menandatangani kerja sama untuk pembangunan bersama pesisir pasifik Rusia dan provinsi timur laut China. Sejauh ini berjalan efektif,” imbuh Barabanov yang juga aktif di lembaga tanki pemikiran Rusia, Valdai



**Oleg N. Barabanov**  
Profesor Moscow State Institute of  
International Relations

Club. Menurutnya, China adalah kunci gerbang masuk kawasan Asia Pasifik.

Selain China, Rusia juga melakukan penetrasi ke negara-negara ASEAN. “Rusia tidak membatasi dengan hanya menjalin hubungan bilateral dengan negara Asia Pasifik dalam bidang politik dan ekonomi melalui Uni Ekonomi Eurasia (uni kerja sama ekonomi antara Rusia, Kazakhtan, dan Belarus – red),”

ujar Barabanov. Rusia juga menggelar konferensi dengan ASEAN. Menurutnya, konferensi Rusia-ASEAN yang digelar di Sochi berlangsung dengan baik dan membawa manfaat.

Aktifnya Rusia melakukan penetrasi ekonomi di Asia Pasifik menunjukkan Rusia ingin juga diperhitungkan dalam pembentukan tatanan dunia baru. Belum lagi, kebijakan politik luar negeri Rusia yang sangat agresif di Eropa Timur merupakan bentuk penegasan bahwa geliat Rusia dalam politik internasional tidak dapat diremehkan.

## Stabilitas Menjadi Prioritas

Jalan panjang harus ditempuh Asia (Asia Pasifik) untuk menjadi kekuatan dunia baru, peradaban baru dunia mendatang. Proses transformasi tatanan dunia pasti menimbulkan gejolak, perubahan yang cepat, dan ketidakpastian. Negara-negara besar dengan agendanya masing-masing, serta negara kecil dan berkembang dengan segala kepentingan nasionalnya mempunyai peran masing-masing dalam terciptanya tatanan dunia yang baru tersebut. Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai perebutan pengaruh kekuatan dan kekuasaan di Asia Pasifik justru mengancam keamanan kawasan dan internasional.

Tantangan keamanan yang beragam dan kompleks, dengan tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan yang lebih besar membuat komunitas internasional resah. Keadaan sekarang ini merupakan hasil kondisi penataan ulang dan transformasi yang terjadi di arsitektur internasional.

Menurut Dr. Yang Yi, menghadapi turbulensi dunia sekarang ini, negara-negara harus fokus pada kebijakan pembangunan dan keamanan yang berorientasi pada stabilitas kawasan dan global. “Kerangka keamanan regional harus berlapis, komprehensif, dan bervariasi. Kerangka keamanan harus diadopsi sebagai *common cause* oleh semua negara”, saran Yi. Ia menyebutnya sebagai *sustainable security*, yaitu konsep keamanan dengan melibatkan negara-negara kawasan yang perlu fokus pada pembangunan ekonomi dan keamanan



**Dr. Yang Yi**  
Sekjen China Institute of International  
Studies (CIIS), Beijing

untuk mewujudkan stabilitas keamanan yang awet.

Saatnya keamanan regional meraih kesempatan ini untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan dengan memelihara stabilitas dan memajukan kerja sama kawasan. Di sinilah negara-negara di kawasan Asia Pasifik dapat mengambil peranan penting. Menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi regional merupakan prioritas agar gejolak tidak mengarah ke instabilitas global. Pentingnya penjagaan stabilitas regional ini juga ditegaskan oleh Satoru Mori. “Aturan (politik internasional) harus didukung dengan kerja sama keamanan kawasan,” ujar Mori.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk memperkuat stabilitas regional, diantaranya dengan kerja sama ekonomi, membentuk mekanisme penyelesaian konflik bersama, membangun kepercayaan (*confidence building measure/ CBM*) di sektor keamanan antar negara di kawasan, dan memperluas dialog antar kawasan. Yang terpenting, setiap negara harus mempunyai *common cause* yang sama yaitu stabilitas regional menjadi prioritas. Dengan adanya *common cause* ini, setidaknya kecenderungan instabilitas akibat perebutan pengaruh kekuatan dan kekuasaan di Asia Pasifik dapat dihindarkan dan mendorong kebangkitan Asia Pasifik sebagai pusat dunia baru. ● (NM)

# Pengungsi serta Dampaknya bagi Dunia dan Indonesia



**Prof. Dr. Nursin Ateşoğlu Güney**  
Yildiz Technical University, Turki

**P**ermasalahan pengungsi kini menjadi tantangan yang tengah dihadapi berbagai negara di dunia. Hal tersebut diungkapkan Prof. Dr. Nursin Ateşoğlu Güney dari Yildiz Technical University, Turki dan Alistair Boulton, Asisten Perwakilan Daerah untuk Perlindungan terhadap UNHCR, Bangkok, dalam Jakarta Geopolitical Forum yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada 18-20 Mei 2017. Sementara itu, Indonesia menjadi negara antara dan tujuan bagi para pengungsi, baik dari kawasan Asia Tenggara, Afrika maupun Timur Tengah. Berbeda dengan beberapa negara menyalurkan para pengungsi sebelum masuk ke dalam perbatasan negara, Indonesia menerima para pengungsi karena sebagaimana

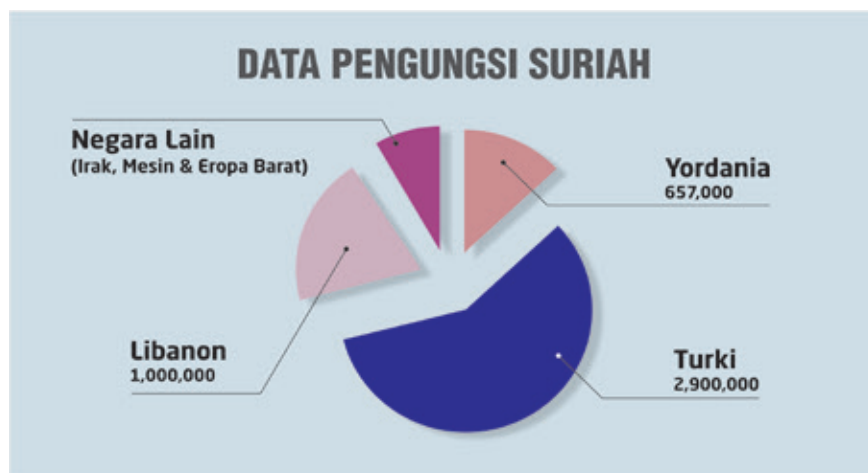
yang tertera dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia melaksanakan tujuan nasional Indonesia dengan menjaga ketertiban dunia.

## Arus Migrasi Setelah Perang Suriah

Peperangan di Suriah setelah *Arab Spring* pada 2011 telah berdampak pada meningkatnya pengungsi. “Dewan Keamanan PBB gagal memberikan solusi atas krisis di Suriah. Di Tunisia dan Mesir, warga negara menuntut reformasi. Krisis pengungsi secara bertahap muncul. Dalam 6 tahun terakhir di Suriah, tuntutan akan kondisi kehidupan yang lebih baik mengakibatkan pemerintah mendorong kekerasan terhadap rakyat mereka sendiri,” kata Prof. Dr. Nursin Ateşoğlu Güney. Konflik di Rusia semakin diperparah dengan adanya *proxy war* -perang oleh pihak ketigaduan melibatkan negara-negara antar kawasan. Menurut data yang dikeluarkan oleh AFP (2017), sampai Desember 2016 sekitar lima juta pengungsi keluar dari negara Suriah, dengan pengungsi Suriah terbesar berada di Turki (2,9 juta), Libanon, Yordania, dan disusul negara lain.

Negara-negara Barat menyalurkan para pengungsi dengan menjadikan Turki sebagai negara transit, antara lain dengan menjanjikan sejumlah uang kepada negara-negara tersebut. Negara-negara Barat melihat pengungsi sebagai ancaman menyebarnya terorisme. Sementara itu, negara-negara seperti Turki, Libanon, dan Yordania mengikuti *open door policy* (kebijakan untuk membuka negara bagi para pengungsi). Tujuan sebagian besar pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika adalah negara Jerman dan Swedia. “Tepat setelah intervensi Rusia, jumlah pengungsi meningkat. Banyak pengungsi yang melintas dari Turki ke Yunani,” kata Prof. Dr. Nursin Ateşoğlu Güney di Jakarta. Dampak dari meningkatnya jumlah pengungsi mengakibatkan negara-negara transit seperti Turki dan Yunani menghadapi krisis ekonomi. “Uang yang dijanjikan (oleh negara tujuan -red.) belum dibayarkan (kepada negara transit), yaitu sebesar 15 miliar dolar AS telah dihabiskan oleh Turki untuk merawat pengungsi.

Saat ini, dunia memiliki jumlah pengungsi terbanyak dibandingkan saat







NATIONAL GEOGRAPHICS

periode setelah perang dunia ke-2. Dalam laporan dikatakan bahwa terdapat 65,5 juta pengungsi dimana jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Empat puluh juta dari total jumlah pengungsi tersebut berada di negara mereka sendiri (pengungsi internal). Situasi di Suriah adalah situasi terburuk. “Saya melihat terdapat sebuah kerancuan antara pengungsi dan terorisme. UNHCR mendapatkan 28 persen dananya dari Amerika Serikat. Amerika Serikat akan mengurangi anggaran yang ditetapkan dari 110.000 USD menjadi 50.000 USD,” kata Alistair Boulton, Asisten Perwakilan Regional untuk Perlindungan, UNHCR

### Negara-Negara ASEAN Lebih Terbuka pada Pengungsi

Konflik di kawasan Asia Tenggara dan kawasan lainnya juga memengaruhi arus pengungsi di ASEAN. Pada dekade terakhir, pengungsi asal Myanmar menjadi pengungsi terbanyak di kawasan Asia Tenggara. Konflik di negara tersebut mengakibatkan etnis Rohingya mengungsi ke negara-negara di sekitarnya. Keadaan tersebut semakin dipersulit dengan kebijakan pemerintah Thein Sein yang mendeportasi seluruh etnis Rohingya untuk mengatasi

kerusakan yang terjadi di Myanmar. Pengungsian suku Rohingya menyita perhatian dunia internasional karena banyak melewati batas wilayah negara seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Indonesia dan beberapa negara lain seperti India, Australia, dan Saudi Arabia.

Tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand meskipun belum menandatangani Konvensi Pengungsi Internasional tahun 1951, dengan dasar kemanusiaan dan peran serta dalam menjaga perdamaian dunia bersedia menerima para pengungsi. Negara-negara tersebut menjadi tujuan utama para pengungsi karena secara geografis mudah dijangkau melalui jalan laut. Bila dibandingkan dengan negara di kawasan lainnya, yakni Bangladesh dan Australia, kedua negara tersebut juga menjadi tujuan utama bagi para pengungsi, namun kedua negara tersebut menolak dengan alasan keterbatasan kapasitas dan ancaman keamanan.

Dalam acara seminar Jakarta Geopolitical Forum 2017 di Hotel Borobudur Jakarta, Alistair Boulton, Asisten Perwakilan Daerah untuk Perlindungan terhadap UNHCR Bangkok, menyebutkan bahwa masih banyak pengungsi yang tidak teridentifikasi.

“Saat ini terdapat 10 juta orang yang tidak memiliki kewarganegaraan namun hanya 3,7 juta yang teridentifikasi, 27 persen diantaranya tinggal di Asia Tenggara. Kebanyakan dari mereka tidak diusir namun mereka tidak diakui oleh negara yang mereka tinggali,” kata Boulton.

Secara umum, negara-negara ASEAN menghormati perlindungan terhadap pengungsi. Berbeda dengan negara Barat yang menghalau para pengungsi sebelum memasuki wilayah negara mereka, negara-negara Asia Tenggara telah bersedia menerima para pengungsi. “Negara-negara seperti Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia telah menerima para pengungsi dengan baik,” kata Alistair Boulton di Jakarta. Boulton juga memaparkan, pengungsi dengan jumlah terbesar terdapat di Asia Selatan yaitu di Bangladesh, sementara di ASEAN terdapat di Malaysia, Thailand, Filipina,



**Alistair Boulton**  
Asisten Perwakilan Regional untuk  
Perlindungan, UNHCR

dan Indonesia. Akan tetapi, Boulton menambahkan bahwa negara-negara ASEAN perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menangani pengungsi baik dari dalam kawasan Asia Tenggara maupun dari luar kawasan. ●

(EH/NMV)

# *Perubahan Iklim Global dan Dampaknya Bagi Ketahanan Negara*

---



[HTTP://SUSTYVIBES.COM](http://sustyvibes.com)

**P**ada 20 Mei 2017, Lemhannas RI menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) dengan tema “The Environment and Climate Change” dengan menghadirkan empat pembicara yaitu Dr. Leonard J. Edwards ahli perubahan iklim Kanada, Dr. Arif Havas Oegroseno Deputi Kementerian Koordinator Bidang Maritim Republik Indonesia, Dr. Nicolas Regaud perwakilan dari Kementerian Kelautan Perancis, dan Sarwono Kusumaatmadja mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia (1999-2001). Dalam kesempatan

tersebut dibahas mengenai perspektif negara terhadap perubahan iklim, serta implikasi perubahan iklim terhadap Asia Tenggara dan geopolitik Indonesia.

### **Gangguan Perubahan Iklim dan Implikasinya Terhadap Pertahanan**

Isu perubahan iklim yang terjadi hingga hari ini merupakan masalah yang selalu menjadi perdebatan di tingkat global. Kekhawatiran akan masalah lingkungan tersebut yang membuat masalah lingkungan kemudian membuatnya dikaji dalam Jakarta Geopolitical Forum (JGF).

Masalah perubahan iklim dibahas karena dampak dari perubahan iklim di tingkat dunia hingga ke Indonesia sudah mulai terlihat. Daerah Artik yang sebelumnya tidak bisa dilalui oleh kapal, sekarang sudah mulai dapat dilewati oleh kapal. Wilayah Kanada menurut Leonard J. Edwards, Peneliti berkebangsaan Kanada tengah menghadapi ancaman perubahan iklim. Lokasi geografis Kanada yang berbatasan langsung dengan wilayah Artik, tentu saja membuat Kanada melihat mencairnya es di Kutub Utara sebagai ancaman terhadap geopolitik mereka.



Senada dengan Arif Havas, Dr. Nicolas Regaud perwakilan dari Kementerian Keamanan Perancis melihat bahwa perubahan iklim akan berpengaruh terhadap pertahanan berbagai negara. Dr. Nicolas Regaud yang juga merupakan ahli Perancis di bidang pertahanan melihat bahwa perubahan iklim merupakan tantangan bagi perdamaian dan dan keamanan. “Perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi lingkungan dan masyarakat, akan tetapi perubahan iklim turut memperlemah keamanan negara. Perubahan iklim saat ini menjadi tantangan strategis utama abad ini,” Regaud menambahkan.

Menurut Regaud, dengan memburuknya iklim dunia, maka akan turut memburuk aspek ketahanan pangan suatu bangsa dan mempengaruhi sumber daya alam yang vital bagi sebuah negara. “Dengan memburuknya sumber daya sebuah negara, maka tentu saja perubahan iklim berkontribusi terhadap migrasi masyarakat, kota-kota menjadi lebih penuh, sementara kemiskinan berdampak pada meningkatnya kejahatan terorganisir, kekerasan, hingga terdapat terorisme,” kata Regaud.

Dalam perspektif keamanan Perancis, institusi pertahanan memiliki peran khusus di bidang perdamaian dan keamanan: yakni institusi tersebut harus



**Dr. Nicolas Regaud**  
Perwakilan Kementerian Keamanan Perancis

mempersiapkan risiko dan tantangan baru dan juga dapat berkontribusi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. “Kita juga perlu mewaspadai bahwa munculnya tindakan agresif berbagai negara, disebabkan karena berubahnya kekayaan sumber daya laut negara akibat berubahnya jalur migrasi ikan dan sumber daya laut lainnya,” Regaud menambahkan.

Sampai saat ini, isu iklim sebagian besar telah dicoba untuk dikaji oleh Kementerian Pertahanan Prancis dari sudut kontribusinya terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Konsekuensinya, Kementerian Pertahanan Prancis berkomitmen untuk berkontribusi sebaik mungkin untuk melestarikan alam dan mengurangi jejak ekologisnya. Seperti pada tahun 2012, strategi pembangunan berkelanjutan Pertahanan disusun, kemudian diperbarui pada tahun 2016.

#### **Arif Havas Oegroseno: Perubahan Iklim Perlu Diwaspadai**

Beberapa negara, seperti Perancis dan Kanada sudah mulai melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi perubahan iklim seperti usaha untuk mengembangkan energi terbarukan. Tidak hanya itu, menurut Leonard, peneliti asal Kanada ini pemerintah Kanada telah melakukan upaya serius dalam mengedepankan isu perubahan iklim di tingkat regional dan global.

Leonard menambahkan kondisi geopolitik Indonesia mulai terancam dengan adanya perubahan iklim. Di Indonesia sendiri perubahan iklim sudah mencapai taraf yang mulai mengkhawatirkan. Mulai dari adanya kebakaran hutan, banjir, longsor, abrasi, hingga kekeringan.

Di tempat yang sama Dr. Havas Oegroseno, Deputy Menko Maritim Republik Indonesia menjelaskan bahwa masalah lingkungan nantinya akan menjadi ancaman geopolitik Indonesia (20/5). Ia memaparkan hal ini mulai terlihat dengan adanya abrasi di Pulau Rangsang, Riau. Pulau yang berbatasan dengan Selat Malaka tersebut telah menjadi pulau dengan abrasi terparah



**Dr. Arif Havas Oegroseno**  
Deputi Kementerian Koordinator Bidang Maritim RI

di Indonesia. Selain itu, mantan Dubes untuk Uni Eropa ini memaparkan bahwa petani di Karawang dan Indramayu tengah berjuang untuk menghadapi abrasi air laut yang menyerang sawah-sawah mereka. Havas menyayangkan kawasan Asia Tenggara yang tengah menghadapi ancaman perubahan iklim, tidak juga menyelenggarakan konferensi untuk membahas masalah itu. Padahal ASEAN telah melaksanakan konferensi dengan beragam tema mulai dari ekonomi, politik, terorisme, perdagangan akan tetapi tidak pernah mengadakan konferensi di tingkat regional khusus membahas mengenai perubahan iklim dan dampaknya terhadap geopolitik Asia Tenggara.

Ada dampak yang nyata akibat perubahan iklim pada berbagai negara. Kita dapat melihat kelangkaan sumber daya alam pada makanan dan minuman. Meningkatnya *level* air laut juga terjadi pada berbagai wilayah. Asia tenggara menghadapi permasalahan seperti meningkatnya *level* air laut, angin topan, dan kebakaran hutan. Di Indonesia, bukti yang nyata yaitu petani Indramayu dan Karawang berjuang untuk menghindarkan ladang padi mereka dari abrasi laut, di Tangerang masyarakat harus berhadapan pada





TIME

angin topan, dan Riau juga menghadapi abrasi yang tinggi.

Migrasi penduduk akibat konflik terjadi pada tahun 1970-an yaitu dari negara Vietnam akibat alasan ideologis dan sejak akhir 2012 terjadi migrasi besar-besaran suku minoritas Rohingya ke berbagai negara Asia Tenggara dan sekitarnya. “Meskipun sampai saat ini belum ada migrasi yang disebabkan oleh perubahan iklim, dan lebih banyak disebabkan karena adanya permasalahan ideologis, namun bukannya tidak mungkin di masa depan akan ada perpindahan penduduk akibat kerusakan iklim. Sebagai contoh, ada implikasi akibat meningkatnya permukaan Laut China Selatan dalam geopolitik Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ketika *level* air laut meningkat, banyak pulau yang tertutup oleh air laut, perbatasan akan menghilang, karena dalam hukum maritim, tidak ada pulau berarti tidak ada pantai, tidak ada pinggir pantai artinya negara maritim tidak bisa mengklaim teritori,” kata Arif Havas Oegroseno saat di Jakarta (20/5).

Pemerintah negara-negara kawasan Asia Tenggara sudah banyak membahas mengenai perubahan iklim, akan tetapi tindak lanjut dari permasalahan

tersebut belum nyata. Terkait hal tersebut, Arif Havas Oegroseno menambahkan, “Banyak diskusi yang membahas dampak perubahan iklim di Asia Tenggara, akan tetapi tidak



**Dr. Leonard J. Edwards**  
Ahli Perubahan Iklim Kanada

ada konvensi yang dibuat hingga saat ini. Kita memiliki beragam dokumen konvensi mengenai terorisme, perdagangan, dan sebagainya, tetapi kita tidak memiliki dokumen yang

membahas mengenai perubahan iklim. Kawasan ini membutuhkan instrumen hukum terkait dengan perubahan iklim dan strategi untuk menerapkan hal tersebut.

Dalam hal pengaruh perubahan iklim terhadap Indonesia, Sarwono Kusumaatmadja, mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia periode 1999-2001, melihat bahwa perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap geopolitik Indonesia dan berubahnya pemain geopolitik global. Selain itu, masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengambil aspek positif dari perubahan iklim dunia seperti meningkatnya jalur perikanan – atau di aspek lain masih melimpahnya sumber daya alam Indonesia dibandingkan negara lain. Sarwono Kusumaatmadja menambahkan, “Daripada bergantung terhadap kebijakan pemerintah yang terlalu umum (*one size fits all policy*), Indonesia perlu menyikapi perkembangan dan perubahan dunia dengan meningkatkan perlindungan dan proteksi terhadap usaha masyarakat, seperti meningkatkan kemampuan Badan Ekonomi Kreatif, dan tentu saja bergerak berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” ●

(EH/NMV)

# *Transformasi Terorisme*



PAKISTANKAKHUDAHAFAIZ.COM

**A**l-Qaeda dan ISIS, dua kelompok yang memiliki jaringan terbesar teroris saat ini, tengah bertransformasi setelah dibombardir oleh pasukan militer koalisi negara-negara yang berkepentingan. Banyak yang mengira setelah kematian Osama Bin Laden, Al Qaeda akan hilang. Begitu pula dengan ISIS yang telah diperangi di wilayah Irak dan Suriah. Nyatanya upaya kontra terorisme ini ternyata belum cukup berhasil dan aksi terorisme kian semarak

di berbagai kota besar dunia seperti yang terjadi di Boston, Paris, dan terakhir London.

Pada sesi keempat Jakarta Geopolitical Forum 2017, berbagai pakar terorisme membicarakan tren terorisme yang tengah bertransformasi dan mengancam keamanan negara. Empat pembicara hadir dalam seminar tersebut yaitu Mohamed Aboel Fadl Editor Koran Al Ahram, koran terbesar di Mesir, Dr. Lina Khatib Kepala Program Middle East and North Africa (MENA) - Inggris, Dr. Rudiger Lohlker Profesor pada Oriental

Institute University of Vienna - Austria, dan Brigjen Polisi Eddy Hartono Wakil Kepala Densus 88 Antiteror - Indonesia.

## **Al-Qaeda Pasca Kematian Osama**

Pada 2 Mei 2011, pasukan elit Amerika Serikat melaporkan bahwa telah menyerang persembunyian pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan. Dalam serangan tersebut dilaporkan bahwa Osama Bin Laden tewas. Lima tahun setelah Osama bin Laden tewas, organisasi Al-Qaeda mengalami sejumlah kemunduran,





**Dr. Rüdiger Lohlker**

Profesor Oriental Institute University of  
Vienna – Austria

kemudian posisi tersebut digeser oleh Negara Islam Irak dan Suriah. Meskipun telah mengalami kemunduran Dr. Rüdiger Lohlker menyebutkan bahwa kelompok Al-Qaeda ini tidak menghilang. “Mereka tetap bertahan dan ideologi mereka bertahan di dunia maya. Mereka mengorganisasi gerakan

bawah tanah di Yaman dan Suriah,” kata Lohlker.

“Kita melihat juga melihat ideologi ISIS juga tidak akan menghilang dalam waktu dekat,” Lohlker menambahkan. Terkait Al-Qaeda, Lohlker menyebutkan bahwa masalah utamanya adalah terkait siklus hidup kelompok teroris. “Di dunia nyata dan dunia maya, Al-Qaeda sukses menciptakan pijakan di Yaman dan Suriah. Lokalisasi sebuah gerakan ekstremisme transnasional ini merupakan langkah yang strategis yang Al-Qaeda lakukan,” kata Lohlker.

Terkait penanganan yang harus dilakukan negara untuk mengatasi terorisme adalah perlunya kemampuan dalam menganalisis apa yang akan direncanakan teroris serta bagaimana pola gerakan dan komunikasi mereka. Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan Dr. Rüdiger Lohlker, “Kita sangat perlu mempelajari mereka, apa yang direncanakan setelahnya, bagaimana cara berpikir mereka, serta bagaimana pola komunikasi mereka seperti menggunakan aplikasi Telegram. Hal ini penting dilakukan karena ketika orang-orang berpikir Al Qaeda telah

dikalahkan, tidak ada penelitian yang dibuat mengenai apa yang kira-kira terjadi pada kelompok ini dan bagaimana kelompok ini berpikir setelahnya.”

Selain serangan dan strategi operasi militer yang telah dilakukan oleh Al Qaeda, kelompok tersebut juga memiliki kemampuan dalam kemaritiman, perminyakan, media massa dan internet, penyelundupan narkoba, hingga pembuatan kapal selam. “Orang-orang di Al Qaeda adalah para pemikir strategis? Apakah mereka akan mengeksekusi rencana mereka segera? *Art text* ditujukan untuk mengajarkan komando mereka dengan metode *online*,” kata Lohlker.

### **Belum Matinya ISIS**

Mohamed Aboelfadl, Pemimpin Redaksi Harian Al Ahram, Mesir menyebutkan bahwa Mesir masalah ekstremisme telah berkembang pada taraf yang mengkhawatirkan baik di Mesir maupun di Indonesia. Menurutnya munculnya gerakan ekstremis itu memiliki beberapa sebab seperti ketidakadilan, kemiskinan dan kurangnya sikap toleransi. Lebih lanjut lagi jurnalis asal Mesir tersebut menjelaskan bahwa mulanya pemerintah Mesir telah menggunakan cara-cara represif untuk menekan ekstremisme, rupanya cara tersebut tidak tepat dan malah mendapatkan perlawanan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Rüdiger Lohlker. “Untuk menangani masalah ekstremisme dan terorisme, yang makin lama makin pintar dan strategis, perlu digunakan langkah-langkah strategis pula untuk menangkali penyebarannya,” ujar peneliti asal Austria tersebut. Perlunya menangkali ekstremisme juga disampaikan oleh Lina Khatib, asal Lebanon tersebut juga menyampaikan perlunya cara-cara non represif. “Untuk menangkali ekstremisme, terutama yang berasal dari Irak dan Suriah perlu diketahui



INDIAOPINES.COM





**Dr. Lina Khatib**

Kepala Program Middle East and North Africa (MENA) Inggris

masalahnya. Mengapa orang-orang mau bergabung ke ISIS” ujarnya.

Beberapa negara seperti Mesir, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mohammad Aboelfadl, menggunakan pendekatan represif untuk mengatasi terorisme di negaranya. Akan tetapi, Kepala Program Middle East and North Africa (MENA) Inggris Dr. Lina Khatib mengatakan, “Saya tidak setuju dengan pendekatan Mesir terhadap gerakan Ihwanul Muslimin yang menggunakan kekerasan dan terorisme. Hal tersebut hanya akan memperbesar kemungkinan masalah yang timbul ketimbang solusi. Di Irak, ada kampanye nasional untuk memerangi terorisme menggunakan pendekatan militer. Akan tetapi selama pendekatan militer terus digunakan, terorisme akan bertransformasi dan tidak berakhir.”

Ada hal yang patut dijadikan pelajaran dari Suriah. Pasca dihilangkan ISIS dari negara tersebut, pelayanan pemerintah dan pelayanan publik juga belum membaik, hal tersebut juga diperparah dengan buruknya perekonomian dan konflik sosial di negara tersebut. “Belum membaiknya pelayanan publik di Suriah, dapat menjadi celah bagi teroris untuk

masuk. Bagaimanapun, tanpa strategi penyediaan layanan publik yang bagus kepada rakyat Suriah, kelompok teroris lainnya akan mengambil keuntungan ini (buruknya infrastruktur publik) dan

menawarkan ‘jasa’nya karena absennya penegak hukum dan pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik,” kata Lina Khatib. ●

(EH/NMV)

## Pendidikan dan Kesejahteraan Kunci Deradikalisasi

Pasca disingkirkannya ISIS dan ditembaknya pimpinan Al Qaeda, bukan berarti aksi terorisme selesai. Terorisme dapat mengambil dalam bentuk dan medium lain. Selain bayang-bayang transformasi terorisme, permasalahan ekonomi, serta konflik sosial yang dihadapi, negara-negara seperti Suriah dan Irak menghadapi masalah berupa tingginya jumlah angkatan pemuda. “Masalah lain di Suriah adalah keberadaan ribuan pemuda yang tidak tahu masa depan mereka menjadi apa setelah lepas dari ideologi ISIS, terutama para remaja yang berada di wilayah yang perbatasan Suriah dan Turki, daerah yang dulu pernah dikuasai ISIS,” kata Dr. Lina Khatib.

Strategi yang dapat digunakan untuk melawan radikalisme adalah dengan memberikan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan para pemuda. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan militer dan mengabaikan kebutuhan hidup masyarakat yang sebenarnya diperlukan,” kata Lina Khatib. Ia juga menjelaskan, beberapa komunitas di bawah kontrol ISIS lebih memilih untuk tetap di bawah kuasa ISIS daripada di bawah kuasa suku Kurdi yang memperlakukan mereka lebih buruk dan kerap mendiskriminasi komunitas Arab. Masalah ketegangan etnis dan sektrarian lebih penting untuk diselesaikan. Tidak semua para pengikut percaya pada ideologi Al Qaeda. Orang-orang bergabung karena keuntungan ekonomi dan harapan adanya perubahan rezim di negara tersebut,” kata Lina Khatib.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Kepala Densus 88 Antiteror Indonesia, Brigjen Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa kunci deradikalisasi adalah melalui pendidikan dan pemberian kesejahteraan. Namun ada beberapa keunikan yang ada dalam pola terorisme di Indonesia, satu diantaranya adalah pola rekrutmen dan penyebaran ideologi yang masif melalui media sosial. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membangun *Cyber Troops* (tentara siber) untuk membantu menanggulangi radikalisme *online*. “Untuk itulah, kami bekerjasama dengan BAIS (Badan Intelijen Strategis TNI),” kata Brigjen Pol Eddy Hartono.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah, Indonesia memiliki kerangka kebijakan dan hukum untuk sebagai langkah counter terrorism. “Deradikalisasi merupakan langkah yang sangat sulit, yang kita butuhkan adalah untuk mengubah paradigma. Untuk itu, Densus 88 Antiteror juga bekerjasama dengan Kementerian Agama sehingga deradikalisasi bisa berlangsung dengan lancar,” tambah Brigjen Pol Eddy Hartono menjelaskan.

# Layanan Kesehatan di Australia Terbaik Kedua di Dunia



THECONVERSATION.COM

**T**im peneliti dari negara Amerika Serikat menemukan sistem pelayanan kesehatan di Australia menduduki jajaran terbaik di antara negara maju. Sementara Amerika Serikat sendiri memiliki sistem terburuk.

Dalam studi membandingkan 11 model perawatan kesehatan nasional yang berbeda, periset Commonwealth Fund yang berbasis di New York, menemukan sistem campuran publik dan privat milik Australia menduduki peringkat terbaik kedua.

Mereka menyimpulkan pelayanan kesehatan milik Inggris adalah sistem yang paling baik secara keseluruhan, diikuti Australia, Belanda, disusul Norwegia dan Selandia Baru yang berbagi tempat di peringkat keempat. Mem-

bandingkan Amerika Serikat dengan Australia, atau negara-negara lainnya, para peneliti mengatakan: "Pelayanan kesehatan di Amerika Serikat relatif buruk, seperti angka kematian bayi dan tingkat harapan hidup di usia 60."

"Amerika Serikat memiliki tingkat kematian tertinggi yang bisa ditangani dengan pelayanan kesehatan, juga telah menghitungnya dengan pengurangan terkecil dalam dekade terakhir." "Meski sudah menghabiskan hampir dua kali lipat dibanding sejumlah negara lain, kinerja Amerika Serikat masih kurang."

Kesimpulan penelitian sudah diterbitkan, bertepatan dengan tekanan dari Presiden Donald Trump pada senator dari Partai Republik untuk mencabut kebijakan reformasi kesehatan yang digagas Barack Obama. Pada bulan Mei, anggota parlemen dari Partai Republik melakukan *voting* untuk mencabut kebijakan kesehatan, sementara Senat akan melakukan *voting* dalam beberapa minggu ke depan.

## Trump: Australia Miliki Kesehatan yang Lebih Baik

Akhir pekan lalu, Presiden Trump mengatakan reformasi yang dilakukannya akan membuat sistem kesehatan Amerika bekerja lebih baik, walaupun dua senator dari partai Presiden telah menyatakan mereka tidak dapat memberikan suaranya.

Trump sudah terus menerus men-



GETTYIMAGES

dorong agar mereka berubah pikiran. “Senat akan memberikan suara soal undang-undang untuk menyelamatkan warga Amerika dari bencana Obamacare,” kata Presiden Trump. “Obamacare telah mendatangkan malapetaka pada kehidupan Amerika Serikat, dan jika kita tidak menggantinya, bencana akan semakin memburuk.”

Pada bulan Mei, dalam sebuah konferensi pers yang digelar Presiden Trump bersama Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull di New York, Trump menyatakan jika sistem pelayanan kesehatan di Australia lebih baik daripada negaranya. “Kami memiliki layanan kesehatan yang gagal,” katanya. “Saya seharusnya tidak mengatakan hal ini di hadapan orang-orang dan teman-teman dari Australia, karena Anda memiliki layanan kesehatan yang lebih baik.”

Komentar ini menimbulkan kebingungan di Amerika Serikat, di mana Partai Demokrat menunjuk sistem Australia termasuk sistem Medicare yang didanai publik secara lebih komprehensif dari pada Amerika Serikat.

### Laporan: Keadilan Layanan Kesehatan Australia Rendah

Terlepas dari komentar Presiden Trump mengenai sistem kesehatan di Australia, para analis mengatakan penghapusan Obamacare yang digagas Trump akan membuat sistem kesehatan di Amerika tidak berbeda jauh dengan di Australia.

Analisis kebijakan kesehatan Menzies Centre di University of Sydney, Dr Lesley Russell, mengatakan sangat sedikit ahli yang berpendapat reformasi gagasan Trump akan memperbaiki sistem kesehatan di AS. “Sangat jelas bahwa Obamacare telah membuat perbedaan besar pada jumlah orang yang memiliki asuransi kesehatan dan kualitas perawatan,” katanya.

“Apa yang akan diajukan oleh Senat Republik adalah menarik asuransi kesehatan dari 23 juta orang yang saat ini

memilikinya, dan akan membiarkan 28 juta orang Amerika yang tidak terlindungi oleh Obamacare tanpa pertanggungjawaban apapun. Sebagian besar pekerja di sektor kebijakan kesehatan mengatakan bahwa usulan Partai Republik yang didukung oleh [Ketua Parlemen] Paul Ryan, [Pemimpin Senat Mayoritas] Mitch McConnell dan Donald Trump akan menjadi bencana.”

Saat dimintai komentarnya soal laporan soal sistem Australia termasuk yang terbaik di dunia, Dr Russell mengatakan kesimpulan tersebut harus dipahami dalam konteks yang tepat. “Kami tahu bahwa biaya di luar tanggungan asuransi yang harus dibayar warga Australia semakin meningkat, sebagian besar karena pembekuan Medicare yang diberlakukan pemerintah selama beberapa tahun terakhir,” katanya.

“Australia sangat buruk dalam

keadilan komposisi yang ditanggung asuransi dan yang dibayar sendiri, atau ekuitas.”

Sementara, menurut penulis studi Commonwealth Fund, Australia berada di bawah soal ekuitas ini. Meskipun Australia berada di depan Amerika Serikat, Prancis dan Kanada dalam hal ekuitas, Australia berada di belakang Inggris, Belanda, Selandia Baru dan Jerman.

Tapi secara keseluruhan peneliti masih menganggap banyak negara yang bisa belajar dari sistem kesehatan di Australia. “Negara-negara dengan kinerja terbaik, seperti Inggris, Australia dan Belanda dapat menawarkan pelajaran penting ke Amerika Serikat dan negara-negara lain,” katanya. ●

(dikutip dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/17/07/18/ot9xf4-layanan-kesehatan-di-australia-terbaik-kedua-di-dunia>)

**Tabel Peringkat Layanan Kesehatan di Negara Maju**

Ranking ▼	Overall	Care process	Access	Administrative Efficiency	Equity	Health Outcomes
1	UK	UK	NETH	AUS	UK	AUS
2	AUS	AUS	GER	NZ	NETH	SWE
3	NETH	NZ	UK	UK	SWE	NOR
4	NZ	NETH	AUS	NOR	SWIZ	SWIZ
5	NOR	US	NOR	SWE	NZ	FRA
6	SWIZ	CAN	SWE	GER	NOR	NETH
7	SWE	SWIZ	NZ	CAN	GER	NZ
8	GER	GER	SWIZ	SWIZ	AUS	GER

SUMBER: COMMONWEALTH FUND



# Putin : 755 Staf Diplomatik AS Harus Angkat Kaki Sebelum September



SPUTNIKNEWS.COM

**P**residen Rusia Vladimir Putin memerintahkan pengusiran 755 staf diplomatik Amerika Serikat setelah Washington menerapkan rangkaian sanksi terhadap Rusia.

Meskipun telah dirilis beberapa hari lalu, namun Putin menegaskan jika 755 orang AS itu harus sudah angkat kaki dari Rusia sebelum 1 September 2017 mendatang.

Berbicara di stasiun televisi Rusia, Putin mengatakan lebih dari 1.000 orang telah bekerja dan masih bekerja di kedutaan dan konsulat-konsulat terhadap AS di Rusia.

“755 orang harus menghentikan aktivitas mereka di Rusia,” kata Putin.

Putin mengaku tidak ingin menerapkan sanksi lanjutan, namun di sisi lain dia mengatakan, tidak melihat hubungan kedua negara akan berubah dalam waktu dekat.

Wartawan BBC di Washington DC, Laura Bicker, mengatakan, pengusiran 755 staff diplomat AS dari Rusia bisa menjadi rekor pengusiran terbesar dari suatu negara dalam sejarah modern.

Sedangkan menurut Wartawan BBC di Moscow, Sarah Rainsford, menuturkan bahwa, ratusan orang meliputi staf diplomat dari berbagai kawasan di Rusia.

Selain para staf kedutaan di Moscow, personel yang terdampak mencakup staf konsulat di Ekaterinburg, Vladivostok, dan St. Petersburg.

Pemerintah AS menilai tindakan Rusia merupakan langkah yang patut disayangkan dan aksinya tidak perlu.

“Kami tengah meninjau dampak pembatasan tersebut dan bagaimana kami akan meresponsnya,” ujar seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.

AS sepakat menjatuhkan rangkaian sanksi terhadap Rusia. Rangkaian sanksi terhadap Rusia dirancang sewaktu Barack Obama masih menjabat sebagai Presiden AS.

Kala itu, Sanksi-sanksi tersebut didesain sebagai bentuk hukuman atas aksi Rusia menganeksasi Crimea dari Ukraina pada 2014 dan dugaan adanya campur tangan Rusia dalam pemilu AS tahun 2016.

Senat AS mengesahkan rancangan undang-undang penjatuhan sanksi baru tersebut. Selanjutnya Parlemen atau

DPR AS juga mengesahkan rancangan undang-undang tersebut.

Langkah pembalasan dari Kremlin ini terjadi beberapa bulan setelah pemerintahan Barack Obama memerintahkan penyitaan dua kantor diplomatik Rusia dan mengusir 35 diplomat Rusia sebagai respons atas dugaan serangan siber terhadap Partai Demokrat AS dan tim kampanye kandidat presiden Hillary Clinton saat pemilu 2016.

Presiden Putin saat itu memilih untuk tidak membalas tindakan pemerintah Obama karena menaruh harapan baik dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden baru AS. Namun, di era Trump, AS masih menjatuhkan sanksi baru terhadap Moscow yang memaksa Rusia untuk membalasnya.

Wujud sanksi ini beragam, antara lain pembekuan aset sejumlah petinggi pemerintah Rusia serta pembatasan pada industri minyak Rusia, sektor keuangan, teknologi, dan persenjataan. ●

(Dikutip dari dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com)  
dan [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com))  
(EH/NMV)



ANTARA

## *ISIS Gempur Marawi*

**K**omandan Angkatan Bersenjata Filipina daerah Mindanao Barat Letnan Jenderal Carlito Galvez mengatakan bahwa para militan ISIS merencanakan serangan bom bunuh diri di dalam dan luar kota Marawi.

Seperti dikutip oleh CNN Indonesia, pertempuran masih berlangsung hingga hari ini di salah satu kota terbesar Filipina itu, dua bulan setelah para militan melancarkan serangan pertama. Presiden Rodrigo Duterte pun mengatakan siap jika konflik mesti berjalan hingga setahun lamanya.

Para petinggi pertahanan negara tersebut mengakui telah meremehkan para militan pro ISIS yang sangat terorganisir itu. Mereka menyapu kota itu pada 23 Mei lalu dan masih menguasai sebagian darinya meski terus digempur oleh ratusan tentara yang dibantu serangan udara dan artileri.

“Mereka pernah mencoba berlari ke arah tentara sambil membawa granat.

Itulah mengapa kami kehilangan banyak tentara kemarin,” ujar Galvez dalam dialog dengan para pengungsi, sebagaimana dikutip CNN Philippines, Minggu (23/7).

Galvez sebelumnya menyatakan sepuluh pasukan asing masih berada di Marawi. Beberapa di antaranya kemungkinan pernah bertempur di Mosul, Irak.

Militer menyatakan pertempuran di Marawi semakin intens sementara tentara merangkak sedikit-sedikit ke pusat pertahanan para militan yang masih tersisa.

Kongres Filipina telah menyetujui permintaan Duterte untuk memperpanjang darurat militer hingga akhir tahun di Mindanao. Dengan demikian, pasukan keamanan sekaligus mendapatkan kewenangan lebih besar untuk mengejar para ekstemis hingga ke luar Marawi.

Namun, masih belum jelas bagaimana Duterte akan mengatasi ekstremisme di


negaranya, kelak, setelah pasukannya merebut kembali Marawi dan mengalahkan sekitar 70 militan yang masih bersembunyi di antara puing-puing daerah komersial itu sembari menyandera banyak warga sipil.

Lebih dari 500 orang tewas, termasuk 45 warga sipil dan 105 pasukan pemerintah. Setelah sejumlah tenggat waktu sepihak pemerintah untuk merebut kembali kota tersebut gagal dipenuhi, pasukan militer menyatakan kini opsi yang mereka punya terbatas karena para sandera tersebut.

Filipina bagian selatan telah dinodai pemberontakan dan kejahatan selama beberapa dekade terakhir. Namun, intensitas pertempuran di Marawi dan kehadiran pasukan asing yang membantu militan lokal membuat sejumlah pihak khawatir kota ini akan menjadi pusat ISIS di Asia Tenggara. ●

(dikutip dari [www.cnnindonesia.co](http://www.cnnindonesia.co))  
(EH/NMV)





## *Perancis menyambut Presiden terbarunya, Emmanuel Macron*

FLICKR.COM

**M**inggu, 5 Mei 2017 menjadi hari bersejarah bagi masyarakat Perancis, tepat pada hari itu mereka menyambut presiden terbarunya. Emmanuel Macron, sang mantan bankir itu sukses memenangi Pilpres Perancis dengan proyeksi hasil penghitungan suara sekitar 65 persen. Politisi tengah pro-Eropa itu mengalahkan saingan terberatnya, kandidat dari kubu kanan jauh, Marine Le Pen, yang meraih kurang dari 35 persen suara. Dengan demikian, Macron resmi menjadi presiden Perancis termuda, di usia 39 tahun.

Dalam pidato kemenangannya, presiden baru ini menyampaikan bahwa halaman baru tengah dimulai dalam sejarah Perancis. “Saya ingin ini menjadi halaman tentang harapan dan rasa saling percaya,” katanya.

Tak hanya mencatatkan diri sebagai Presiden Prancis termuda, kemenangan Macron juga memberikan sejarah baru bagi dunia politik Perancis. Pasalnya, dalam Pemilihan Presiden Perancis kali ini, untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, terjadi presiden terpilih bukan berasal dari dua partai arus utama,

Sosialis dan Republik yang berhaluan kanan tengah.

Macron sendiri bukanlah wajah baru di dunia politik Perancis. Pria kelahiran 21 Desember 1977 yang punya visi memperbaiki ekonomi, mengintensifkan hubungan dagang Perancis - Uni Eropa, dan membuat lingkungan hidup lebih nyaman bagi warga Perancis ini memang dikenal cerdas dan memiliki ambisi yang kuat. Setelah lulus dari Sekolah Nasional Administrasi pada 2004, ia mengawali karirnya sebagai pemeriksa keuangan di Kementerian Ekonomi Perancis. Empat tahun kemudian ia menjadi bankir di Rothschild & Cie hingga mencapai posisi *managing director*.

Karier politiknya sendiri dimulai pada 2012 ketika ia menjadi Sekjen di Partai Sosialis. Di tahun 2014, Macron lantas terpilih menjadi menteri ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Francois Hollande, politisi Partai Sosialis. Namanya kian dikenal publik setelah membuat Macron's Law serta memangkas 200 aturan yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi Perancis.

Puncak karir Emmanuel Macron adalah saat ia maju sebagai kandidat presiden pada November 2016 tanpa adanya

dukungan dari partai politik. Dengan kandidat lawannya adalah Marine Le Pen dari partai nasionalis kanan.

Macron harus menjalani dua kali putaran sebelum akhirnya diumumkan sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilu.

Tak hanya cerita karir dan kesuksesannya yang mengiringi kemenangan Macron pada pemilu Prancis. Kisah asmara Macron yang menikahi guru dramanya Brigitte Trogneux yang usianya lebih tua 24 tahun ikut menjadi sorotan publik. Kendati demikian, Macron menyebut bahwa sang istri adalah tokoh penting di balik kesuksesannya hingga saat ini.

Kemenangan Macron disambut hangat, tak hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Ia menjadi perhatian dunia dan dianggap sebagai angin segar bagi perkembangan politik dunia. Prioritas Macron yang menasar pada permasalahan perbedaan agama di Perancis, mendukung perubahan dan pembangunan kekuatan Uni Eropa, serta kemampuannya untuk merangkul semua lapisan melalui kekuatan persuasinya menimbulkan harapan bahwa kemenangan seorang Emmanuel Macron dapat membawa perubahan bagi masyarakat Perancis dan dunia. ● (EH)



# *Beda dengan Trump, Dubes AS Puji Kepemimpinan Sadiq Khan*

**B**eberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump menyerang Wali Kota London Sadiq Khan dalam serangkaian cuitannya di Twitter sehubungan dengan adanya serangan teror pada Sabtu (3/6) waktu setempat, Duta Besar AS untuk Inggris Lewis Lukens memuji kepemimpinan kuat Sadiq Khan.

“Dengan hati yang berat, saya menawarkan belasungkawa dan dukungan saya kepada orang-orang di Inggris. Amerika berduka dengan Anda. Tanggapan dari layanan darurat, penegak hukum dan pejabat di London, dan juga orang-orang London sangat luar biasa,” katanya dalam cuitan di akun Twitter kedutaan @USinUK.

“Saya memuji kepemimpinan kuat dari @MayorofLondon saat dia memimpin kota ini maju setelah serangan kejam ini.”

Adapun pernyataan Trump yang dicuitkan melalui akun Twitternya itu mengecam pernyataan Sadiq Khan yang meminta warganya agar tetap tenang. “Sedikitnya tujuh orang tewas dan 48 orang terluka dalam serangan teror dan Wali Kota London mengatakan tidak ada alasan untuk khawatir!” Demikian salah satu cuitan Trump pada Ahad (4/6) waktu setempat.

Seorang juru bicara Khan menanggapi komentar Trump tersebut karena tidak mengetahui informasi. Ia juga mengatakan bahwa Trump sengaja mengeluarkan pernyataan dari Wali Kota untuk meyakinkan orang-orang tentang meningkatnya kehadiran polisi setelah serangan tersebut.

Sementara itu Hillary Clinton, tokoh



STANDARD.CO.UK

Demokrat yang dikalahkan Trump saat pemilihan juga memuji Sadiq Khan. “Setelah tindakan kejam dan pengecut yang tak terkatakan, orang-orang di London dan Inggris memilih mengatasi ketakutan. Teman Anda di AS berdiri dengan Anda,” katanya dalam cuitannya di Twitter yang menanggapi cuitan pengumuman dari Wali Kota bahwa Jembatan London akan dibuka kembali pada Senin (5/6) pagi.

Segara setelah menjabat pada bulan Mei tahun lalu, Khan terlibat pertengkaran dengan Trump atas seruannya yang melarang sementara orang-orang Muslim memasuki AS. Di mana Khan menyebut rencana tersebut sebagai

rencana orang bodoh. Dia kemudian meningkatkan kritiknya pada bulan September di Chicago saat dia menuduh Trump ‘bermain di tangan Daesh (ISIS)’ dengan kebijakan anti-Muslimnya.

Menurut informasi dari Telegraph, Senin (5/6), Trump menimbulkan kemarahan dengan mencoba mengumpulkan dukungan untuk larangan kontroversialnya yang melarang Muslim bepergian ke negaranya pada Sabtu malam saat serangan berlangsung. ●

[dikutip dari

<http://www.republika.co.id/berita/ internasional/global/17/06/05/or2b1i330-beda-dengan-trump-dubes-as-puji-kepemimpinan-sadiq-khan>]



## *Gubernur Lemhannas RI: Kompetisi Ideologi Mengaburkan Karakter dan Jati Diri Bangsa*

*“Kita harus bercermin dan meneladani sikap para pendiri bangsa yang menghargai dan menghormati perbedaan dan kebhinnekaan bangsa sebagai kekuatan untuk membangun dan mewujudkan cita-cita mulia, menuju masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik”*

**B**enang merah proses sejarah terbentuknya negara Indonesia menunjukkan bahwa bangsa dan negara Indonesia lahir dan berdiri justru karena perbedaan dan kemajemukan. Inilah yang harus dipahami dan disadari oleh berbagai komponen bangsa utamanya generasi muda. Pernyataan ini dikemukakan oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya di acara peringatan

HUT ke-52 Lemhannas RI yang jatuh bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2017.

“Kita harus bercermin dan meneladani sikap para pendiri bangsa yang menghargai dan menghormati perbedaan dan kebhinnekaan bangsa sebagai kekuatan untuk membangun dan mewujudkan cita-cita mulia, menuju masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik,” jelas Agus Widjojo.

Ia menambahkan, bahwa hal itu perlu ia sampaikan mengingat tugas menjaga

keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia bukan semata menjadi tugas pemerintah, TNI dan Polri. Melainkan, juga merupakan tugas para politisi, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga kalangan akar rumput.

Setiap warga negara, kata Agus, harus cerdas dalam menyikapi berbagai isu negatif yang berkembang di tengah masyarakat, agar tak mudah terprovokasi dan terjebak dalam narasi yang bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.





“Hidupkan kembali dialog dan interaksi antar saudara sebangsa yang berbeda. Terkait hal ini, keluarga besar Lemhannas RI harus mampu menjadi garda terdepan dalam memelopori budaya ini,” tambah Agus Widjojo.

Agus Widjojo menegaskan bahwa akhir-akhir ini bangsa Indonesia tengah menghadapi tantangan kompetisi ideologi yang mengaburkan karakter dan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Hal itu terlihat dari menguatnya penggunaan politik identitas yang mengabaikan penghargaan terhadap perbedaan dan kemajemukan dalam proses demokrasi di pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang lalu. Menguatnya kecenderungan perilaku politik ini, menurut Agus, perlu disikapi, diwaspadai, dan diantisipasi secara bijak dan cerdas oleh seluruh komponen bangsa, karena mengingkari konsensus yang dibangun para pendiri bangsa.

“Atas dasar pertimbangan itulah, Lemhannas RI mengangkat tema ‘Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Lemhannas RI Bertekad Meneguhkan Kembali Kehidupan Kebangsaan Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945’ sebagai tema peringatan hari ulang tahun ke-52 Lemhannas RI,” jelas Agus Widjojo.

Dalam sambutannya, Agus Widjojo juga memaparkan bahwa dalam perjalanan selama 52 tahun, Lemhannas RI telah mengalami pasang surut kelembagaan yang dipengaruhi

oleh dinamika kepemimpinan nasional di setiap era. Namun, dinamika politik itu tidak mempengaruhi roh, semangat, dan orientasi pengabdian Lemhannas RI hingga saat ini. Bahkan, selama setahun terakhir ini Lemhannas RI telah membuahkan hasil yang membanggakan. Antara lain, Lemhannas RI telah menerima sertifikat International Organization for Standardization (ISO)-9001:2016 terkait sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* dari badan sertifikasi internasional.

Lemhannas RI juga mendapatkan predikat laporan hasil pemeriksaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan kementerian/ lembaga tahun anggaran 2016. Artinya, Lemhannas telah dua tahun berturut-turut menerima predikat WTP, setelah tahun sebelumnya juga telah menerima predikat yang sama.

Meskipun demikian, Agus Widjojo mengingatkan bahwa berbagai capaian itu tidak membuat Lemhannas lalai. Sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam fungsi pendidikan dan pengkajian, tidak sulit untuk mencari perbandingan guna memotivasi kemajuan. Sebagai lembaga gagasan, hendaknya Lemhannas RI menjadikan dirinya sebagai lembaga pembelajar atau *learning organization*. “Artinya, Lemhannas tidak boleh berpuas diri dengan merasa telah memiliki segalanya dan menjadi yang terbaik di tengah lembaga sejenis yang ada,” jelas

Agus Widjojo.

Sebagai lembaga penghasil gagasan hendaknya disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hadir dalam piramida keilmuan yang berawal dari sumber filsafat ilmu secara universal. Proses pengembangannya pun tidak dapat mengingkari prosedur dan mekanika pencarian kebenaran berdasarkan logika dan proses sebab-akibat. “Memandang Lemhannas berbeda dari lembaga yang berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, hanya akan menempatkan Lemhannas dalam kondisi statis yang mengakibatkan Lemhannas RI ketinggalan dari lembaga lain. Organisasi pembelajar mensyaratkan Lemhannas untuk senantiasa memeriksa dan menjaga kendali mutu atas segala fungsi yang diembannya, serta pemutakhiran terhadap dinamika perkembangan yang terjadi,” jelas Agus Widjojo.

Gubernur Lemhannas RI juga menambahkan bahwa Lemhannas RI pada tanggal 18 hingga 20 Mei lalu telah menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) 2017 yang mengangkat tema *Geopolitics in a Changing World* sebagai kegiatan puncak peringatan hari ulang tahun ke-52 Lemhannas RI. JGF ini merupakan ajang internasional yang mengumpulkan para akademisi maupun pakar dalam bidang geopolitik dari berbagai negara di dunia. Diharapkan, di masa mendatang JGF dapat diselenggarakan secara berkala.

“*Jakarta Geopolitical Forum* merupakan langkah awal dan pencapaian terbesar Lemhannas RI dalam upaya membangun citra Lemhannas RI di kancah internasional. Sekaligus, membangun budaya baru pemikiran strategis yang lebih memberi keseimbangan dengan orientasi keluar terhadap kultur strategis yang secara tradisional lebih berorientasi kepada orientasi ke dalam, walaupun pada akhirnya semua bertujuan guna diabdikan bagi kepentingan nasional,” pungkas Agus. ●

(EH/NMV)





## *Orasi Ilmiah Warnai Peringatan Ulang Tahun Lemhannas RI*

**S**ebagai salah satu rangkaian peringatan Ulang Tahun Lemhannas RI, Orasi Ilmiah digelar di Ruang Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lantai IV, Lemhannas RI pada Senin (22/5). Orasi Ilmiah tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Dalam sambutannya, Agus Widjojo mengatakan bahwa perkembangan globalisasi dan demokratisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi memberikan

dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang turut mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa ini di masa yang akan datang.

Selain itu, lanjut Agus Widjojo, bangsa ini juga tengah dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu - isu regional maupun global. Potensi ancaman tersebut kini tidak hanya bersifat fisik, namun juga perang yang dilakukan oleh pihak ketiga (*proxy war*).

Agus Widjojo menekankan bahwa hal tersebut memberikan dampak besar kepada ketahanan nasional bangsa dalam aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi,

politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

Maka dari itu, jelas Agus Widjojo berharap orasi ilmiah ini akan memberikan perluasan dan pencerahan wawasan serta cara pandang kita dalam menyikapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks demi masa depan bangsa.

Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan Orasi Ilmiah oleh Dr. Anhar Gonggong, Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI dengan judul Orasi “Bertegak Berpikir -Bekerja, Melampaui Kelampauan, Berimajinasi- Rancangan untuk Hari Depan”. ● (NVS)

## Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Bung Karno di Lemhannas RI

**M**egawati Soekarno Putri meresmikan Patung Bung Karno di halaman depan Lemhannas RI, pada Rabu (24/5). Peresmian tersebut merupakan salah satu Rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Lemhannas RI yang ke-52 yang juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei yang lalu.

Pada peresmian ini, Megawati mengatakan bahwa tujuan Presiden Soekarno mendirikan Lemhannas RI yaitu untuk mengumpulkan para calon pemimpin bangsa dari seluruh Indonesia. Para calon pemimpin bangsa tersebut harus dibekali dengan ilmu Geopolitik agar memahami hakikat bangsa Indonesia.

Geopolitik, menurut Megawati, adalah ilmu yang mengajarkan kesadaran akan posisi Indonesia di dunia. Jika tidak mengetahui posisi Indonesia di dunia, rakyat Indonesia akan menyebut diri sebagai orang Indonesia namun tidak berperilaku seperti orang Indonesia. “Sebab, kalau kita tidak tahu di mana posisi Indonesia, maka kita akan berpikir bahwa bangsa Indonesia bukan apa-apa. Badan kita menyebut orang Indonesia, tetapi cara berpikir kita ikut orang luar,” jelas Megawati.

Jika rakyat Indonesia mengetahui Geopolitik, lanjut Megawati, Indonesia dapat mengatur strategi masa depan untuk meraih kejayaan Indonesia. Maka dari itu, hakikat Lemhannas harus dikembalikan kepada rohnya. Sehingga nantinya para calon pemimpin Bangsa yang telah menempuh pendidikan di Lemhannas RI akan memahami ilmu geopolitik.

Mengenai sosok Bung karno, menurut Megawati, semasa hidup Proklamator Kemerdekaan Indonesia tersebut telah menerima 23 gelar Honoris Causa dari universitas dalam maupun luar negeri dalam berbagai bidang keilmuan seperti politik, hukum, sosial, dan budaya. Menurutnya, bangsa ini seharusnya



mempelajari sosok Bung Karno yang mampu memerdekakan Indonesia.

Lebih lanjut, Megawati memaparkan bahwa Bung Karno adalah sosok yang suka membaca. Kumpulan-kumpulan pikiran Bung Karno, lanjut Megawati, harus dengan berani dibuka untuk dipelajari agar dapat dilihat bagian yang relevan masih dapat digunakan karena Bung Karno adalah sosok yang visioner.

Sebelum menutup pidatonya, Megawati mengatakan bahwa Lemhannas RI harus dapat menjadi sebuah alat perjuangan bagi bangsa dan negara bukan bagi kelompok dan perorangan.

Agus Widjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa pada saat memberikan kuliah umum pertama yang berjudul “Geopolitik” bagi peserta Pendidikan Reguler Angkatan pertama se usai meresmikan Lemhannas RI, Bung Karno mengatakan bahwa orang tidak akan bisa membangun bangsa dan negara yang kuat jika tidak mengetahui ilmu geopolitik. Hal tersebut, lanjut Agus Widjojo, dapat diartikan bahwa jika ingin memiliki ketahanan nasional yang kuat, harus mempelajari ilmu geopolitik. Dengan ilmu geopolitik, Bangsa Indonesia dapat membawa Indonesia pada tujuan nasional.

Selain itu, Bung Karno juga berpesan bahwa sangat penting bagi para calon pemimpin Indonesia untuk belajar memahami jati diri bangsa yang bersumber dari empat Konsensus Dasar Bangsa. Bung Karno juga menyampaikan bahwa pemimpin Indonesia dalam belajar mengenai pertahanan tidak hanya belajar mengenai “bedil dan mesiu” tetapi juga harus mempelajari pengetahuan multikompleks menyangkut masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, demografi, geografi, serta demografi. “Tiga poin tersebut terdapat dalam kurikulum pendidikan di Lemhannas RI,” pungkas Agus Widjojo.

Hadir dalam peresmian tersebut Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMKK) Puan Maharani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Guruh Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri, dan mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Sekretaris Utama Komjen Pol Arif Wachyunadi, serta seluruh Pejabat dan staf Lemhannas RI. ●

(NVS)





## *Donor Darah Dalam Rangka HUT ke-52 Lemhannas RI*

Lemhannas RI mengadakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-52 Lemhannas RI. Donor darah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Lemhannas tiap tahunnya, kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Gedung Pancagatra Lemhannas RI tersebut disambut baik oleh para pegawai dan staf Lemhannas RI. Antusiasme pegawai terlihat sangat tinggi dan menyemarakkan

kegiatan peringatan HUT Lemhannas RI.

Para pegawai harus melakukan tes terlebih dahulu sebelum pengambilan darah karena ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendonorkan darah diantaranya, tensi darah yang cukup dan kadar HB (haemoglobin) sesuai dengan ketetapan medis. Untuk donor darah kali ini telah terkumpul sebanyak 100 kantong darah. Seperti umum diketahui bahwa rutinitas donor darah dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bagi para pendonor yang telah menyumbangkan darahnya mendapatkan makan siang. ●

(EH/NMV)





Perista Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan sosial "Pelatihan Keterampilan RPTRA Kalijodo Dalam Rangka HUT ke-52 Lemhannas RI" di RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat pada 3 Mei 2017. Turut hadir Perista Lemhannas RI, Pelatih Keterampilan Kerajinan Tangan, dan Ketua Penggerak PKK Kelurahan Angke

## *Aksi Sosial Perista Lemhannas RI untuk Negeri*

**P**ara *founding fathers* Indonesia telah sepakat bahwa Indonesia tidak didirikan atas dasar satu agama tertentu, tapi didirikan berdasarkan atas Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Namun ironisnya, beberapa dekade belakangan nilai-nilai Pancasila seakan tergerus dan kehilangan kekuatan dalam mempersatukan Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia kerap terjadi pertikaian, perselisihan bahkan meluas menjadi kerusuhan massa. Ego kedaerahan, kesukuan, dan keagamaan kini seakan muncul lebih kuat, sehingga sebagian masyarakat seperti kehilangan perekat dan pemersatu bangsa.

Keprihatinan yang mendalam juga terjadi ketika implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hampir memudar karena Pancasila hanya dipahami sebagai jargon, bukan perbuatan

nyata. Atas dasar kondisi tersebut, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Lemhannas RI, Perhimpunan Istri Anggota (Perista) Lemhannas RI melakukan aksi sosial bagi masyarakat dengan mengadakan pelatihan keterampilan bagi warga Kalijodo dan pemberian bantuan buku bagi anak-anak SDN 1 dan SDN 2 Kelurahan Angke, Jakarta Barat pada 2 dan 9 Mei 2017 lalu.

### **RPTRA Kalijodo, Sebagai Langkah Awal Kepedulian**

"Dulu sewaktu kecil, saya ingat sekali bagaimana sumpeknya kondisi Kalijodo, wilayah yang padat penduduk, dan masyarakatnya terpaksa melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan nilai moral untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, saya memilih RPTRA Kalijodo karena bertekad untuk memberikan sumbangsih di daerah yang dulunya terkenal tidak baik," kata Ketua

Perista Lemhannas RI, Ibu Niniek Agus Widjojo dalam kesempatan diwawancarai oleh redaksi Swantara.

Dalam beberapa referensi disebutkan, Kalijodo sejak sebelum kemerdekaan Indonesia dikenal sebagai lokasi prostitusi terselubung. Wilayah Kalijodo sebenarnya sudah direncanakan untuk ditertibkan sejak tahun 2014 dengan alasan digunakan sebagai jalur hijau, kemudian rencana penertiban tersebut baru direalisasikan Pemprov DKI Jakarta pada Februari 2016 dengan merelokasi penduduk Kalijodo ke Rusunawa Marunda dan Pulogebang, atau dipulangkan kembali ke daerah.

Untuk memperbaiki kondisi masyarakat di Kalijodo, maka langkah pertama yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah dengan memberikan fasilitas umum yang memadai di kawasan Kalijodo yaitu dengan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Daerah ini memiliki



Kunjungan pengurus Perista Lemhannas RI ke RPTRA Kalijodo mengawali kegiatan pelatihan bagi masyarakat Kalijodo (3/5).

luas 5.489 meter dengan luas bangunan 1.468 meter. RPTRA merupakan konsep ruang publik berbentuk ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komuniti yang ada di sekitar RPTRA tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya. RPTRA dibangun di tengah permukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga di sekitar.

RPTRA dibangun sebagian besarnya dengan menggunakan sumbangan dana *Corporate Social Responsibility*. Peran Pemprov biasanya dengan menyediakan lahan. Proses pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan RPTRA juga melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan perawatan taman juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar RPTRA dan dikoordinir oleh anggota PKK.

Dalam aksi sosial, Perista Lemhannas RI yang dipimpin oleh Ibu Niniek Agus Widjojo beserta PKK Kelurahan Angke memberikan pelatihan keterampilan tangan antara lain berupa tatakan gelas, dompet, tempat HP dan cermin lipat. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Perista ini, diharapkan anggota PKK Kelurahan Angke yang bermukim di sekitar Kalijodo mempunyai keahlian dalam membuat ketrampilan dari bahan-bahan yang

mudah didapat seperti sisa-sisa kain atau perca.

“Tatakan gelas dan cermin lipat ini terbuat dari bahan-bahan sederhana, akan tetapi tentu saja memiliki nilai jual yang tinggi karena dikemas dengan cantik dan dapat dijadikan penghasilan tambahan bagi ibu-ibu warga sekitar. Hasil dari kerajinan tangan ini bisa dijual di PKK-Mart



Perista Lemhannas RI bersama Peserta pelatihan dari Unit Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat dan Unit Pelayanan Terpadu P2TP2A Provinsi DKI Jakarta saat memberikan pelatihan kerajinan tangan (3/5).

atau dipasarkan kepada tim marketing kami,” kata Yani, salah satu pengelola RPTRA Kalijodo yang juga warga kawasan tersebut. Dalam perkembangannya, RPTRA Kalijodo dikelola dibawah dinas PPAPP (Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak) dan dikelola oleh masyarakat sekitar yang sudah mengikuti saringan tes yang diberikan

pemerintah DKI. Keberadaan RTH dan RPTRA tentu saja memberikan nilai yang positif bagi warga sekitar, salah satunya disebabkan inisiatif Pemprov DKI untuk memberdayakan warga sekitar untuk mengelola RPTRA dan RTH.

Pelatihan diberikan kepada 33 kader PKK sebagai peserta mewakili 11 Rukun Warga (RW), Kelurahan Angke. Harapan Perista Lemhannas RI adalah melalui 33 peserta ini, mereka dapat meneruskan pengetahuan yang mereka dapat dari Perista Lemhannas RI kepada warga sekitar agar terampil membuat kerajinan tangan tersebut yang nantinya dapat dipasarkan melalui PKK-Mart.

Turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, Unit Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Jakarta Barat dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) P2TP2A Provinsi DKI Jakarta sebagai peserta pelatihan.

“RPTRA terbuka bagi siapa saja dari berbagai kalangan, fungsi RPTRA bukan hanya tempat untuk bermain saja, tetapi juga tempat untuk belajar, tidak hanya bagi anak tapi juga orang tua, karena disini ada perpustakaan, ada kegiatan dari pendidikan dan disini dididik untuk

menjadi agen perubahan mental. Mereka harus diajarkan untuk disiplin dan lebih pintar, mereka harus membaca bukan sekedar membaca tetapi juga harus mengerti dengan apa yang mereka baca, kami mengajarkan semua itu dengan hati,” kata Yani.

M. Dirhamsyah, Lurah Kalijodo menyambut baik adanya peran serta





Kegiatan pelatihan keterampilan tangan bersama kader PKK Kelurahan Angke, Jakarta Barat (3/5)>



Kegiatan sosial Perista Lemhannas RI saat menyerahkan bantuan buku tulis kepada murid SDN 01 dan SDN 02 Angke dalam rangka HUT ke-52 Lemhannas RI (9/5).

organisasi masyarakat dalam membangun masyarakat dan lingkungan RTH dan RPTRA Kalijodo, sebab setiap RPTRA di DKI Jakarta saat ini ditantang untuk menjadi mandiri oleh pemerintah DKI, mereka memiliki koperasi yang diterapkan melalui PKK-Mart yang bekerjasama dengan anggota PKK.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi bagi ibu-ibu Perista Lemhannas RI yang telah memberikan kontribusinya dalam memberikan pelatihan kepada warga sekitar RTH dan RPTRA dan menunjang kemandirian warga sekitar,” kata Dirhamsyah. Ia juga menambahkan bahwa kontribusi warga dan organisasi masyarakat seperti Perista Lemhannas RI dapat menjadi langkah awal perbaikan kehidupan yang sebelumnya kurang sehat di lokasi Kalijodo, terutama untuk anak-anak.

Ada satu pengalaman berkesan bagi para anggota Perista Lemhannas RI di RTH dan RPTRA Kalijodo. “Saat kami sedang rapat persiapan dengan pengelola di pendopo RPTRA, beberapa hari sebelum pelaksanaan bakti sosial, datang ke pendopo yang sama, seorang bapak tua beserta keluarganya yang dari tampilan terlihat dari keluarga sederhana, mereka sedang bermain lalu tiba-tiba bapak itu pergi ke gudang, keluar membawa kain pel kemudian membersihkan kotoran yang berserakan karena anaknya yang buang-buang sampah. Bapak tua itu memberikan pelajaran yang sangat sederhana, menjaga kebersihan. Kebersihan, tenggang rasa, penghargaan terhadap lingkungan, rasa memiliki, tentu saja merupakan cerminan mendasar dari nilai-nilai Pancasila. Kalau

kita mencintai rumah kita, maka ayo kita bersihkan bersama-sama dan jaga bersama-sama. Alangkah sederhananya tindakan bapak tersebut, tapi tidak pernah kita pikir, bahwa perubahan mental dapat dilakukan dengan cara yang sederhana,” kata Ibu Niniek Agus Widjojo. RTH dan RPTRA Kalijodo bukan hanya sekadar tempat bermain, tapi tempat tersebut dapat menjadi ruang untuk belajar bersama dimana anak-anak dididik menjadi agen perubahan mental dan belajar dari hal sederhana yang dicontohkan orang tua kepada anak-anak.

Kegiatan positif tersebut merupakan upaya Perista Lemhannas RI dalam mendukung pembangunan bangsa. “Meskipun pengajaran keterampilan tersebut sangat sederhana, tetapi hal tersebut memiliki nilai dalam mencerdaskan bangsa. Tentu saja kegiatan ini sangat sesuai dengan empat konsensus bangsa yang telah diterapkan Lemhannas RI di dalam memantapkan nilai-nilai Kebangsaan,” kata Kolonel CAJ Dr. Paula Theresia saat ditanyakan tanggapannya terhadap kegiatan bakti sosial tersebut.

Ibu Niniek juga mengatakan bahwa melalui kegiatan sederhana tersebut terkandung banyak nilai yang bisa dipelajari. “Jangan melihat kegiatan ini dari sisi kegiatannya saja tetapi yang terpenting adalah lihat apa yang kita bisa ambil dari kegiatan ini, karena nilai dalam kegiatan ini mengandung nilai kebersamaan, keberagaman, saling berbagi dan saling menghargai sesama,” tambah Ibu Niniek.

Kegiatan sosial di Kelurahan Angke ini berlanjut di lain hari dengan penyerahan

buku kepada siswa SDN 01 dan SDN 02 Angke bekerjasama dengan Panitia Penerbit Buku Anak. Selain lokasinya yang berdekatan kegiatan sosial sebelumnya, SDN 01 dan SDN 02 Angke dipilih karena fasilitas di sekolah ini yang cukup terbatas. Diharapkan dengan pemberian bantuan



Salah satu buku yang disumbangkan kepada murid SDN 01 dan SDN 02 Angke, berisi tulisan untuk mengingatkan dan menumbuhkan rasa kebangsaan, keragaman, serta persatuan Indonesia kepada murid-murid.

buku, dapat mengurangi beban siswa dalam membeli buku tulis. Sebanyak 450 lusin buku dibagikan kepada seluruh siswa yang sangat senang menerimanya. Buku-buku ini merupakan sumbangan dari beberapa tokoh seperti Lions Club Jakarta Selatan, Addie MS, dan beberapa sumbangan individu lainnya. ● (EH/NMV)





## *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Tantangan Global*

---

**M**enteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi memberikan ceramah mengenai “Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Tantangan Global” di hadapan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI di Ruang NKRI Lemhannas RI.

Menteri Luar Negeri RI menekankan mengenai empat prioritas politik Indonesia di luar negeri yaitu: Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perlindungan WNI, diplomasi ekonomi,

serta peran regional dan global Indonesia.

Ceramah tersebut juga membahas mengenai bagaimana politik Indonesia di luar negeri khususnya pada negara-negara yang sedang berkonflik dan akan memiliki dampak terhadap Indonesia. Seperti pemasalahan Israel dan Palestina, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang ingin menjadikan konflik ini menjadi kepentingan lain, sehingga akan sulit sekali bagi Israel untuk mematuhi permintaan-permintaan dari dewan keamanan PBB terkait masalah

kependudukan, karena perlu waktu dan komunikasi jangka panjang. Dalam menangani masalah ini kita harus *well crafted* (menyiasati) agar situasinya tidak memburuk karena kami para diplomat dididik untuk menjadikan situasi sesulit apapun untuk menjadi lebih baik.

Pembahasan selanjutnya adalah antara Qatar dan Saudi Arabia, *Financing Terrorism* menjadi dasar permasalahan ini. Efek langsungnya adalah pesawat udara yang ingin melakukan perjalanan ke Qatar harus memutar dan memakan waktu lebih



WALLUP.NET

lama. Menlu Retno Marsudi langsung mengadakan komunikasi dengan duta besar Indonesia di negara-negara timur tengah sebagai pencegahan jika situasi kedua negara tersebut meningkat dan terjadi instabilitas di Timur Tengah.

Retno Marsudi juga Menjelaskan mengenai diplomasi yang dilakukan Indonesia di dunia internasional terus berusaha memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan konflik global, hal ini dilatarbelakangi oleh Indonesia yang memiliki Mandat Konstitusi mengenai Perdamaian dan Ketertiban Dunia yang tercantum di Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Selain karena alasan perdamaian, kenapa Indonesia sangat aktif pada politik luar negeri adalah masalah perlindungan WNI, karena pada saat terjadi konflik diplomasi maka yang akan terkena efeknya secara langsung adalah warga negara Indonesia. Isu mengenai perlindungan WNI sangat intensif sekali, karena banyaknya kasus terutama mengenai perdagangan manusia. Banyak kasus hukum WNI yang disebabkan karena korban Perdagangan Manusia,

Pada tahun 2016 Kemenlu telah

menyelesaikan 18.282 kasus hukum terkait WNI yang tinggal, kerja, dan melakukan perjalanan di berbagai titik di dunia. Kasus hukum yang terselesaikan mencapai 70 % dan 30% sisanya dikarenakan administrasi yang belum lengkap atau kasus belum masuk persidangan. Retno Marsudi mengatakan, "Dalam tahun ke tahun penyelesaian kasus selalu meningkat karena kita mencoba untuk mengoptimalkan perlindungan kepada WNI."

Kementerian Luar Negeri RI juga telah melakukan reformasi yang signifikan di bidang pelayanan, dimana semua pelayanan dilakukan dengan sangat cepat, tepat, dan transparan. Masalah yang harus dibenahi adalah permasalahan di hulu sebagaimana terjadi pada masalah penempatan tenaga kerja Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan, "Dalam menyelesaikan suatu masalah, jangan sampai kemudian membuat masalah lain. Kami menyelesaikan masalah dengan hati-hati dan harus bisa menyalasi agar tidak terjadi masalah yang lebih pelik lagi."

Dalam kasus migrasi internasional, Indonesia bekerjasama dengan Australia mengadakan pertemuan dengan negara asal dan negara destinasi untuk mengatasi isu *Irregular Movement of Person*, dimana pada tahun 2015 terdapat 2.000 pengungsi datang ke Indonesia yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh. Hampir seluruh pengungsi tersebut sudah dikembalikan ke negara asalnya, sedangkan sekitar 250 pengungsi dari Myanmar sedang menunggu proses verifikasi untuk bergabung dengan keluarganya di Malaysia.

Menlu RI juga membahas mengenai meningkatnya ancaman terorisme, dimana dulu sifatnya *konvergen* dalam artian mereka mengumpulkan orang-orang untuk di latih lalu melakukan aksi terorisme, namun sekarang berubah menjadi bersifat *divergent* dimana mereka menyebarkan orang-orang yang sudah dilatih kembali ke negara asalnya dan melakukan aksi terorisme secara tidak struktur. Di akhir, Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI Lemhannas RI melakukan tanya jawab dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi. ● **(EH/NMV)**

# Lemhannas RI Selenggarakan Seminar Parenting

Lemhannas RI selenggarakan seminar *Parenting* dengan tema “Pola Asuh yang Menyenangkan Tanpa Kekerasan dan Teriakan” di Auditorium Gajah Mada, Gedung pancagatra Lantai III, Lemhannas RI pada Rabu (10/5).

Seminar yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo ini menghadirkan tiga pembicara yaitu Psikolog Anak dan Remaja sekaligus penulis buku *Happy Parenting* Novita Tandry, Tenaga Profesional Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP serta Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait.

Dalam paparannya, Arist Merdeka Sirait menjelaskan bahwa yang disebut dengan anak-anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Anak-anak juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi seperti salah satunya hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, dan hak mendapatkan perlindungan.

Arist kemudian memaparkan bahwa saat ini telah banyak tindak kejahatan terjadi di Indonesia. Dalam tindak kejahatan itu, salah satu tindak kejahatan yang paling banyak terjadi adalah tidak kejahatan seksual pada anak. Yang lebih mengejutkan, lanjut Arist, tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh orang terdekat korban sendiri yang seharusnya berkewajiban untuk mendidik dan melindungi hak mereka sebagai anak-anak. Untuk memotong mata rantai kekerasan terhadap anak tersebut,



orang tua harus kembali memenuhi hak-hak anak secara penuh.

Sementara itu Novita Tandry memaparkan bahwa pola asuh dalam keluarga adalah hal yang paling dasar dalam membentuk ketahanan nasional. Untuk mengerti pola asuh yang terbaik bagi anak, orang tua harus mengerti pola tumbuh kembang setiap anak. Proses mendetail dari pola tumbuh kembang tersebut akan dialami secara bertahap oleh tiap anak. Para orang tua harus diajarkan untuk memahami proses tersebut dan tidak memaksakan hal yang belum seharusnya dialami oleh anak.

Tumbuh kembang anak yang paling mudah menyerap banyak informasi, lanjut Novita Tandry, adalah ketika anak berusia 1 hingga 5 tahun. Maka dari itu, pada usia tersebut para orang tua harus memberikan pendidikan dan juga informasi yang dibutuhkan agar selalu tertanam hingga anak-anak tersebut dewasa.

Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn)

Lumban Sianipar, S.IP, Tenaga Profesional Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI mengungkapkan bahwa efek dari kekerasan mental yang dilakukan kepada anak akan lebih berbekas daripada efek dari kekerasan fisik. Seorang anak, lanjut Lumban Sianipar, S.IP, anak harus diajarkan untuk menyeimbangkan emosi baik yang positif dan negatif. Di satu sisi, seorang anak harus memiliki pribadi yang baik dan lemah lembut namun di sisi lain seorang anak harus mampu mengungkapkan amarahnya dengan cara yang baik. Selain itu, anak-anak juga harus mengetahui tentang kebangsaan secara dasar.

Seminar yang dihadiri oleh seluruh staff dan pejabat Lemhannas RI ini ditutup dengan peluncuran buku “*Happy Parenting Without Spanking or Yelling*” yang ditulis oleh Novita Tandry dan penyerahan buku secara simbolis kepada Gubernur Lemhannas RI. ●

(CHP)



## *Duta Besar Rusia Temui Gubernur Lemhannas RI*



**D**uta Besar Rusia untuk Indonesia HE Mikhail Y. Galuzin menemui Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo untuk melakukan *Courtesy Call* di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI pada Rabu (15/3).

Dalam *Courtesy Call* tersebut, YM. Galuzin mengatakan bahwa kerja sama Indonesia melalui Lemhannas RI dan Rusia telah terjalin dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya perwakilan Lemhannas RI yang berkunjung ke Rusia dan juga kehadiran HE. Galuzin sebagai

pembicara di beberapa diskusi di Lemhannas RI.

Terkait dengan Jakarta Geopolitical Forum (JGF), HE Galuzin menanggapi positif rencana penyelenggaraan JGF terlebih karena adanya narasumber yang berasal dari Rusia.

Dalam kesempatan *Courtesy Call* ini pula, HE Galuzin juga menyerahkan surat resmi keikutsertaan pembicara dari Rusia dalam JGF. Selain itu, HE Galuzin juga menyampaikan bahwa seorang analis politik dari Rusia juga akan turut menghadiri JGF sebagai peserta forum.

Forum ini, jelas HE Galuzin, merupakan sebuah forum yang tepat

dan menarik, karena saat ini seluruh negara di dunia menghadapi perubahan global yang sangat signifikan.

Menanggapi pernyataan HE Galuzin, Agus Widjojo menyatakan bahwa hal tersebut sebagai sebuah awal yang baik dari pelaksanaan JGF. Agus Widjojo juga mengucapkan terimakasih atas partisipasi pembicara dan peserta dari Rusia.

Selain itu, Agus Widjojo mengatakan bahwa kerja sama yang telah terjalin sejak lama antara Indonesia dan Rusia diharapkan mampu menjadi dasar bagi hubungan kerja sama yang lebih baik di masa depan. ●

(BIA)



## *Kunjungan Duta Besar Fiji ke Lemhannas RI*

**P**ada Kamis (16/3), Duta Besar Fiji untuk Papua Nugini HE Esala Teleni mengunjungi Lemhannas RI untuk melakukan *Courtesy Call* dengan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra lantai I, Lemhannas RI.

Dalam *Courtesy Call* tersebut, HE Teleni menyampaikan bahwa kunjungan ke Lemhannas RI kali ini merupakan salah satu dari rangkaian kunjungan Duta Besar Fiji ke Jakarta. “Kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan bagi pemerintah dan rakyat Fiji,” ungkap HE Teleni.

Sementara itu, Agus Widjojo yang menyambut baik kedatangan Duta Besar Fiji tersebut, juga menyampaikan sejarah, visi dan misi Lemhannas RI serta program pendidikan di Lemhannas RI seperti PPRA, PPSA, dan P3DA

serta program Pemanjapan Niai–Nilai Kebangsaan.

HE Teleni berharap kunjungan ini dapat menjadi sarana untuk memperkokoh hubungan bilateral dua negara. Selain itu, HE Teleni juga menjelaskan bahwa kunjungan ke Jakarta ini bertujuan untuk mempresentasikan lebih dalam mengenai strategi keamanan nasional Fiji ke beberapa lembaga pemerintah di Indonesia yang terkait dengan bidang tersebut.

Dalam *Courtesy Call* tersebut, Agus Widjojo didampingi Tenaga Profesional Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP., Kepala Biro Humas Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc., serta beberapa Pejabat Struktural Lemhannas RI. ●

(EH)



## *Training of Trainers Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Profesi Pendidik di Bandung*

**S**ebagai upaya untuk memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi para pendidik di daerah, Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto membuka secara resmi kegiatan *Training of Trainers (ToT)* pada Senin (3/4) di Ball Room Hotel Aston Tropicana Cihampelas, Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung selama 10 hari ini ditujukan agar para pendidik yang terdiri dari perwakilan guru, dosen, dan widyaiswara ini mendapatkan kemampuan mengelola keahlian, ketrampilan, dan wawasan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan serta menjadi fasilitator yang handal.

Selain itu, dalam kegiatan yang diikuti 100 peserta tersebut digunakan metode pemantapan melalui ceramah, diskusi, pembinaan peserta, praktek mengajar, dan *outbond*. Nantinya, peserta akan mendapatkan materi terkait 4 Konsensus Dasar Bangsa yang terdiri dari materi utama (Pancasila, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika), materi dasar (wawasan nusantara, ketahanan nasional, kepemimpinan nasional dan kewaspadaan nasional) dan materi penunjang (pengantar nilai-nilai kebangsaan, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, dan *interpersonal skill*).

Dalam sambutan Gubernur Lemhannas RI, yang dibacakan oleh Dedy Yulianto disampaikan bahwa kegiatan *Training of Trainers* nilai-nilai kebangsaan ini, para peserta akan mendapatkan latihan-latihan yang terkait dengan bagaimana memperkuat kemampuan mengelola keahlian dan ketrampilan serta wawasan dalam memberikan pengajaran.

Selain itu, diberikan pula pelatihan bagaimana menjadi fasilitator yang handal dan mampu menciptakan



kondisi kelas yang gembira dan menyenangkan, sehingga materi pembelajaran dapat masuk ke dalam alam pikiran, rasa dan berbuah ke dalam tindakan yang berwawasan kebangsaan dari setiap peserta didik

Dedy mengharapkan agar setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta dapat memanfaatkan potensi mereka sebagai pendidik dengan semaksimal mungkin.

“Saya berharap para peserta dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan lebih menyelami potensi yang selama ini terpendam baik pada diri bapak ibu maupun peserta didik. Ke depan, perlu kita gali lebih mendalam dengan senantiasa mau membuka diri terhadap

perubahan tanpa harus meninggalkan kewaspadaan terhadap dampak negatif ancaman era globalisasi, sehingga memiliki daya lentur yang handal dalam menghadapi relita dan fenomena kehidupan yang semakin kompetitif dan serba berubah,” ungkap Dedy dalam pembukaan kegiatan ini.

Turut hadir dalam pembukaan yaitu Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Wakapolda Provinsi Jawa Barat, Kasdam III/Siliwangi, Danlantamal III, Danlanud Husein Sastranegara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Karo Humas Settama Lemhannas RI dan beberapa pejabat struktural dan fungsional Lemhannas RI. ●

(NVS)



Prastiyo Diatmono, S.K.M., M.M.  
Alumni Lemhannas RI

## *Lemhannas RI sebagai Lembaga Pembentuk Karakter Pemimpin Nasional*

**M**engikuti program pendidikan di Lemhannas RI ternyata memberi kesan mendalam bagi Prastiyo Diatmono, profesional yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang pertambangan batubara. “Lemhannas mempunyai arti sangat penting dalam pembentukan karakter pemimpin nasional yang berwawasan internasional (*world class leaders*), membangun jaringan (*networking building*) serta memanfaatkan waktu yang terbatas (*time limit management*) dalam menyelesaikan setiap persoalan dan tugas yang menjadi tanggung jawab kami,” jelas Prastiyo.

“Selama menjalani pendidikan di Lemhannas, semua pembelajaran dikemas secara *holistic, integral*, dan didukung simulasi implementasi pada target pendidikan (*goal oriented education*) dengan pendekatan pedagogis yang benar dan secara berkelanjutan senantiasa terus dievaluasi,” tambahnya.

Pria yang juga berprofesi sebagai dosen pascasarjana di salah satu perguruan tinggi di Jakarta ini juga menambahkan bahwa semua bidang pembelajaran di Lemhannas saling bersinergi dan tak terpisahkan. Khususnya untuk bidang pekerjaannya saat ini.

“Materi pembelajaran di bidang Pancasila dan UUD NRI 45, Kepemimpinan, ekonomi, manajemen konflik, Hukum, Geopolitik dan Sismennas, mampu memberikan cara pandang yang lebih luas. Hal ini tentu sangat membantu guna menciptakan pondasi yang kuat untuk menuju kemajuan bagi sesama,” tandasnya.

Harapan Lemhannas RI untuk menghasilkan pendidikan yang optimal dan bermanfaat untuk Indonesia pun dapat terwujud dengan sistem pembelajaran yang baik. Terkait dengan pendidikan yang dijalankan di Lemhannas, ia menambahkan kajian mengenai perubahan situasi dan kondisi yang terjadi serta pengkajian yang *out of the box* mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang sudah ada di Lemhannas. ●

(MD/AS)



Drs. Sukendra Martha, M.Sc., M.App. Sc.

Tenaga Profesional Bidang Politik Dalam Negeri Lemhannas RI

## *Pakar Geografi, Penulis Buku Humor*



**K**arir Sukendra Martha terbilang mulus sesuai dengan keilmuan yang ia tekuni. Lahir dan besar di daerah pelosok Prajawinangun, Cirebon, Sukendra sukses berkarir sebagai seorang pakar geografi tanah air. Dengan kompetensi tersebut, kini ia memegang jabatan sebagai Tenaga Pengajar Bidang Geografi dan Tenaga Profesional bidang Politik dalam Negeri di institusi pencetak pemimpin bangsa, Lemhannas RI.

Mengawali karir di Lemhannas RI

sebagai seorang Tenaga Pengajar Geografi pada tahun 2011, Sukendra memiliki beragam pengalaman menarik. Salah satunya, ia harus membimbing peserta pendidikan yang berstatus sebagai seorang profesor perihal penyusunan Taskap atau kertas karya perorangan, “Saat itu bahkan saya belum menjadi doktor,” ujarnya seraya tertawa.

Yang juga unik, berkarir sebagai peneliti dan pendidik di bidang geografi dan politik dalam negeri ternyata tak lantas membuatnya menjadi seorang yang

kaku dan terlalu serius. Sukendra malah dikenal sebagai sosok hangat dan humoris. Bahkan, ia telah menelurkan beberapa buku humor ke pasaran. Buku humor buatannya merupakan sindiran dan buah pemikiran terhadap kejadian di sekitar diri dan terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Karya buku humornya antara lain berjudul Peta Kamasutra (kependekan dari Anda Perlu Tahu tentang Kejadian Menarik Seputar Survei dan Pemetaan), Berdoa di *Night Club*, dan juga Haji Tamatu (Haji Tangi Mangan Turu).



LAZARUS.ELTE.HU

Hal ini sekaligus sebagai bentuk kecintaan Sukendra terhadap dunia literasi. Ia sadar sebagai peneliti, ia tidak dapat terhindar dari kegiatan menulis.

Tapi, meskipun gemar *ngebanyol* dan menulis humor, saat bekerja Sukendra tak pernah setengah-setengah. Terbukti, selain mengajar ia juga aktif dalam berbagai organisasi di bidang geografi dan kartograf. Bahkan ia sempat menjabat sebagai *Vice President International Cartographic Association* sejak 2011 hingga 2016.

Sebagai ahli geografi yang mendalami bidang Kartografi atau pembuatan peta, selama bertugas sebagai Tenaga Pengajar di Lemhannas RI, ia selalu menanamkan kepada peserta didik mengenai pentingnya mengetahui wilayah dan mendalami Tri Gatra Nasional. Menurutnya pemahaman ini penting untuk menjadi bekal mereka ketika memimpin, baik di lingkup militer, kepolisian, maupun sipil.

“Sebagai calon pemimpin tentu amat dibutuhkan kemampuan untuk mengetahui wilayah, daerah, dan

negara yang akan dipimpin maka dalam memberikan materi saya sering menampilkan materi mengenai daerah dan wilayah agar para peserta didik dapat memahami lebih mendalam geografi Indonesia,” kata Sukendra.

Sedikit menengok ke belakang, Sukendra kecil yang biasa dipanggil Endang tak pernah membayangkan akan menjadi seorang pakar geografi. Semasa kecil hingga remaja ia lebih sering berinteraksi dengan kesenian dan budaya khas daerahnya, Cirebon. Namun, sejak menempuh pendidikan di Fakultas Geografi, Universitas Gajah Mada di tahun 1973, ia seperti tak pernah terlepas dari geografi, baik dalam pendidikan maupun karier profesional. Lantas apa yang menyebabkan dirinya begitu menyukai geografi? “Kehidupan manusia di bumi serta interaksi manusia dengan alam merupakan hal menarik untuk dipelajari,” jawab ayah dari dua anak perempuan dan satu orang laki-laki ini.

Karirnya kerjanya berawal ketika ia diterima sebagai peneliti di Bakosurtanal

(sekarang BIG) pada tahun 1979. Di lembaga itu ia sukses dan sempat menjabat sebagai Sekretaris Utama Bakosurtanal. Bekerja di Bakosurtanal membuka peluang baru baginya untuk melanjutkan studi. Terbukti, ia terpilih bersama rekan-rekannya untuk belajar ke negeri Paman Sam dan mendalami bidang Geografi di Oklahoma State University, Amerika Serikat. Seperti tak pernah puas mencari ilmu, ia kemudian melanjutkan studinya di bidang Penginderaan Jarak Jauh, di University of New South Wales, Australia.

Di sela-sela kesibukannya, Sukendra tetap aktif memberikan kontribusi mengenai Geografi bersama rekan-rekan alumni dan tenaga pengajar lainnya. Tulisan-tulisannya kemudian ia distribusikan ke berbagai instansi kementerian terkait.

Kecerdasan Sukendra ternyata menurun kepada anak-anaknya. Betapa tidak. Ketiga anaknya telah lulus sarjana dan ketiganya berhasil menyandang predikat *cum laude*. ●

(EH/AA)



**Arrienda Rizky**

Staf Deputi Pendidikan Lemhannas RI

## *Penerjemah yang Gemar Mengasah Diri*

**R**estu dan harapan orang tua, mengantarkan Arrienda Rizky sebagai seorang pegawai negeri di institusi pencetak pemimpin bangsa, Lemhannas RI. Padahal, awalnya wanita yang biasa dipanggil Rienda ini bercita-cita untuk menjadi seorang guru. “Awalnya saya ingin menjadi guru, terlebih saat berkuliah pun saya sudah mengisi waktu saya dengan mengajar di lembaga kursus bagi anak-anak. Namun seiring waktu saya menemukan *passion* saya yang lain yaitu sebagai seorang penerjemah,” ujar Rienda.

Mengawali karir di Lemhannas pada tahun 2015 lalu, Rienda awalnya cukup sulit menyesuaikan diri. Walaupun ia sudah terbiasa menangani materi-materi transkripsi selama berkuliah di jurusan Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ternyata dunia kerja sangat jauh berbeda dengan apa yang sebelumnya ia pelajari di kampus. Namun, berkat kemauannya untuk selalu mengasah kemampuan diri, wanita asal Madiun ini akhirnya dapat mudah menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. “Awalnya saya kaget dan kesulitan ketika saya harus mengerjakan materi transkripsi seorang diri, mulai dari penulisan hingga *editing*. Namun, sering berjalannya waktu saya mampu beradaptasi dan merasa pekerjaan tersebut sebagai tantangan yang harus saya hadapi.” tambah Rienda

Baginya, bekerja merupakan sebuah pengalaman dan tahapan menarik yang harus dilewati dan syukuri. Ketika bekerja wanita ini seringkali diminta untuk memandu sebuah acara, baik itu



*workshop* maupun agenda lain. Awalnya ia memiliki kendala dalam membawakan materi acara yang seringkali berubah-ubah. Hal itu membuat dirinya harus mampu berpikir cepat dan lebih kreatif lagi. “Namun, lama-kelamaan hal tersebut justru saya nikmati dan saya syukuri sebagai sebuah pembelajaran bagi saya,” jelas Rienda.

Kemauan belajar yang tinggi itu pun membawa Rienda meraih skor test TOEFL tertinggi di Lemhannas RI. Ditanya mengenai hal tersebut, ia menjawab “Dulu saat berkuliah kami sudah terbiasa dengan berbagai macam test, karena kami dihadapkan dengan resiko mengulang kelas atau ditempatkan di kelas khusus,” ujarnya seraya tersenyum.

Ke depan, Rienda berharap dapat mendapatkan kesempatan untuk

kembali menambah wawasan dan pengetahuannya dengan berkuliah lagi, melanjutkan ke jenjang S2 jurusan *Interpreting and Translating Studies* di Monash University, Australia. Jurusan tersebut ia pilih bukan tanpa alasan. Ia ingin agar ke depan dirinya dapat meningkatkan kualitas diri sekaligus berinovasi dalam lingkungan pekerjaan dengan membentuk sebuah tim penerjemah yang mampu membawa Lemhannas ke arah yang lebih baik lagi.

“Saya ingin membentuk sebuah tim penerjemah, sehingga nantinya Lemhannas RI memiliki standarisasi dalam penggunaan bahasa asing yang dapat diterapkan pada pembuatan dokumen maupun materi pendidikan,” pungkas Rienda. ●

(CHP)

# Susi Pudjiastuti, Menteri Sarat Prestasi dari Kabinet Jokowi

**S**osok perempuan kelahiran Pangandaran, 15 Januari 1965 ini menjadi inspirasi bagi banyak pihak berkat kinerja dan kebijakan yang ia lakukan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan, baru-baru ini ia dipuji oleh aktor kenamaan Hollywood yang juga aktivis Lingkungan, Leonardo DiCaprio pada konferensi PBB mengenai Kelautan di New York, Amerika Serikat.

DiCaprio yang berbicara sebagai *UN Messenger of Peace* menyebut tindakan yang dilakukan Susi dalam memberantas pencurian ikan sangat berani. DiCaprio terutama memuji sistem pemantauan kapal perikanan dengan satelit (*vessel monitoring system/VMS*) yang digunakan oleh Susi. Data VMS ini bisa diakses oleh *Global Fishing Watch* (GFW) sehingga pergerakan kapal-kapal ikan dapat terpantau secara langsung.

Menurut dia, data VMS ini sebagai bentuk transparansi terkait perikanan di lautan, yang sebelumnya tertutup bagi masyarakat. “Kepemimpinan tersebut sangat berani dan inovatif, sebuah kepemimpinan yang dibutuhkan dunia,” ujar sang aktor memuji Menteri Susi.

Pujian tak hanya datang dari DiCaprio. Senator Amerika Serikat Sheldon Whitehouse, pemimpin Kaukus Kelautan pada acara *Ocean for Tomorrow*, turut melontarkan pujian terhadap kinerja Susi menjaga lautan. Sambil setengah bercanda, sang senator berkata bahwa Susi telah menenggelamkan kapal dengan jumlah yang bahkan jauh lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Angkatan Laut AS.

Perjalanan karir Susi sebelum diangkat oleh Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan terbilang cukup berliku. Terlebih ketika publik mempertanyakan alasan Presiden

dan Wakil Presiden mengangkat wanita yang tak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi seorang Menteri.

Namun, tak perlu waktu lama baginya untuk membuktikan kepada masyarakat dan dunia, bahwa m e n g a n g k a t n y a menjadi seorang menteri adalah pilihan yang tepat. Terbukti dengan diraihnya penghargaan tertinggi dan paling prestisius di bidang kemaritiman internasional, *Peter Benchley Ocean Awards*.

## Awalnya Pengepul Ikan

Susi kecil tumbuh dan besar di daerah Pangandaran. Putri sulung dari tiga bersaudara pasangan H. Ahmad Karlan dan Hj. Suwuh Lasminah dengan segudang mimpi dan cita-cita. Dibesarkan dalam keluarga yang berkecukupan tak membuatnya menjadi sosok yang manja.

Setamat Sekolah Menengah Pertama, ia pergi merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Sayang, pendidikannya harus terhenti di kelas dua. Kegagalannya itu bukan karena ia malas belajar melainkan karena baginya ia tidak cocok dengan sistem dan aturan sekolah pada saat itu. Susi lebih memilih jalannya sendiri untuk mewujudkan citanya.

Saat usianya baru menginjak 17 tahun, Susi mencoba berwirausaha. Bisnis pertamanya adalah berjualan *bed cover* dan sarung bantal yang ia tawarkan ke hotel-hotel yang ada di kawasan wisata Pangandaran. Meski awalnya ia mengaku sulit meyakinkan pemilik hotel untuk



RAPPLER.COM

membeli dagangannya, Susi tak patah semangat.

Jiwa bisnis Susi kembali mencium potensi usaha dari lokasi tempat ia tinggal di pesisir selatan Pulau Jawa. Daerah yang setiap harinya dipakai ratusan nelayan untuk mendaratkan perahu-perahunya di pantai dengan membawa hasil tangkapan yang melimpah. Saat itu, Susi beralih profesi menjadi seorang pengepul ikan atau bakul ikan, sebutan untuk para perempuan pengepul hasil laut tangkapan nelayan di Pangandaran.

Berkat semangat dan kegigihannya, Susi hanya membutuhkan waktu satu tahun untuk menguasai pasar Pangandaran dan berekspansi hingga Cilacap. Sukses sebagai bakul ikan memacu semangat Susi untuk terus mengembangkan kemampuan bisnisnya. Pendapatan yang ia peroleh sebagai bakul ikan kemudian digunakan sebagai modal untuk membeli perahu yang kemudian disewakan ke para nelayan.

Potensi kelautan dan hasil tangkapan para nelayan yang menyewa perahunya kemudian ia pasarkan ke berbagai daerah. Perkembangan bisnisnya terbilang pesat sehingga dia mendirikan pabrik pengolahan ikan pada 1996 dengan nama PT ASI Pudjiastuti *Marine Product*. Dan demi menjaga populasi dan kualitas ikan maupun lobster yang akan dijualnya ia menggunakan cara alami dengan tidak menggunakan cara yang merusak ekosistem laut. Hal ini membawanya menembus pasar ekspor ke beberapa negara di dunia, seperti Jepang, China, dan Eropa.

Perkembangan bisnis seorang Susi Pudjiastuti tidak hanya sampai disitu, pada tahun 2004, Susi mengawali bisnis maskapai penerbangan. Ide ini tumbuh ketika musibah Tsunami Aceh pada 2004. Pesawat milik Susi yang sebelumnya digunakan untuk keperluan ekspor ikan, menjadi pesawat pertama yang mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di wilayah terisolir. Dengan memiliki 2 unit pesawat pada awal bisnisnya, hingga 2013 lalu, Susi Air telah berkembang dengan memiliki 49 unit pesawat yang menghubungkan ratusan rute penerbangan di kota-kota terpencil di Tanah Air.

Kesuksesan Susi membangun kerajaan bisnis mendapat pengakuan dari berbagai kalangan. Hal tersebut dapat dilihat dari sederet penghargaan yang diraihinya seperti Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, *Young Entrepreneur of the Year* dari *Ernst and Young Indonesia*, *Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise Exporter* dari Presiden Republik Indonesia, *Inspiring Woman Award for Economics* dari Metro TV, Ganesa Widya Jasa Aditutama dari ITB dan masih banyak lagi.

### Karir sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan

Sukses berkarir sebagai seorang pengusaha di bidang transportasi udara dan kelautan serta segudang pengalaman dibidang kemaritiman membawanya ke posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kiprahnya dalam



ANTARA

memajukan aspek kemaritiman tanah air diawali dengan memerangi penangkapan ikan ilegal di wilayah laut Indonesia. Sejak menjabat sebagai menteri, Susi mengeluarkan sejumlah kebijakan berani, seperti pemberantasan *illegal fishing*, moratorium kapal perikanan asing, pelarangan *transshipment*, dan pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Salah satu kebijakannya untuk mengatasi praktek penangkapan ikan ilegal atau *illegal fishing* sukses mendongkrak stok ikan nasional. Dalam dua tahun belakangan, stok ikan Indonesia mengalami peningkatan.

Berdasarkan Data Komisi Pengkajian Ikan Nasional, pada 2014 stok ikan Indonesia hanya 6,5 juta ton. Namun, pada 2016 sudah mencapai 12 juta ton. Angka konsumsi ikan masyarakat juga meningkat dari 36 kg per kapita pada tahun 2014 menjadi 43 kg per kapita di tahun 2016. Indonesia menjadi negara dengan stok tuna yang fantastis, di mana 60 persen *yellow fin tuna* berasal dari Indonesia.

Setelah mampu menjawab keraguan masyarakat terhadap latar belakang

dirinya dengan segudang prestasi dan pencapaian yang telah ia berikan bagi Indonesia membuatnya dikenal sebagai sosok inspirasi bagi perempuan Indonesia. Tak hanya Di Caprio yang terinspirasi akan kebijakan Ibu dari Panji Hilmansyah, Nadine Pascale, dan Alvi Xavier ini. Sebuah komik asal Jepang berjudul *Golgo 13* karya Takao Saito bahkan membuat tokoh yang terinspirasi dari sikap tangguh dan tegas dari seorang Susi dalam memberantas *illegal fishing* di Indonesia.

Lebih lanjut, kiprah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam menjaga ekosistem laut sudah diakui oleh dunia dengan penghargaan *Leaders for a Living Planet* dari *World Wildlife Fund* (WWF) pada November 2016 lalu.

Di berbagai kesempatan, Susi Pudjiastuti selalu mengungkapkan bahwa sektor maritim Indonesia merupakan harapan bangsa untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sesuai dengan ungkapan dari Presiden pertama RI Soekarno yang mengatakan Indonesia harus kembali ke laut agar berjaya kembali. ●

(MD/AA)



### Upacara Peringatan HUT ke-52 Lemhannas RI

GUBERNUR LEMHANNAS RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan sambutan pada peringatan ulang tahun ke-52 Lemhannas RI dengan tema “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Lemhannas RI Bertekad Meneguhkan Kembali Kehidupan Kebangsaan Berdasarkan Pancasila Dan Undang – Undang Dasar 1945” pada 24 Mei 2017.

Lemhannas RI mengajak dan menyerukan kepada berbagai komponen bangsa di berbagai tatanan kehidupan sosial politik, untuk memahami dan meneguhkan kembali tempat Konsensus Dasar Bangsa yang dirintis oleh para pendiri bangsa.



### Pemotongan Tumpeng HUT ke-52 Lemhannas RI

PEMOTONGAN tumpeng oleh Gubernur Lemhannas RI, Letjen (Purn) Agus Widjojo dalam rangka ulang tahun Lemhannas RI yang ke 52 di halaman Lemhannas RI pada Rabu, (24/5). Dalam rangka hari berdirinya Lemhannas RI yang menginjak angka ke-52 pada tahun 2017 ini, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsenal Madya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi, para staff di lingkungan Lemhannas RI dan Perista Lemhannas RI.



### Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan para Pimpinan Redaksi dan Wartawan

FORUM Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan para Pemimpin Redaksi Media Massa Cetak, Elektronik dan Online yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Ruang Anjungan, Gedung Trigatra Lantai III, Lemhannas RI pada Senin (15/5).

Dalam sambutannya, Agus Widjojo mengatakan bahwa kegiatan forum komunikasi pimpinan Lemhannas RI dengan para pimpinan redaksi dan wartawan diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan HUT ke-52 Lemhannas RI. Tema yang diangkat pada Peringatan Ulang Tahun Lemhannas RI kali ini adalah “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Lemhannas RI Bertekad Meneguhkan Kembali Kehidupan Kebangsaan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Forum Komunikasi ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan para pemimpin redaksi dan wartawan media massa dan ditutup dengan ramah tamah.





### Kunjungan NWC US ke Lemhannas RI

DELEGASI National War College of The United State (NWC) yang dipimpin oleh Ambassador Piper Campbell melakukan kunjungan ke Lemhannas RI pada Selasa (4/6). Kunjungan tersebut diterima oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dengan melakukan Courtesy Call (CC) di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI.

Kunjungan tersebut menjadi diskusi melalui pemaparan Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib dengan moderator Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P seputar peran diplomasi pertahanan Indonesia terkait konflik Laut Cina Selatan dan pemberantasan terorisme yang hingga saat ini Indonesia yang selalu bekerja sama dengan Negara lain dan PBB, kemudian pengaruh islam dalam politik di Indonesia serta kebijakan-kebijakan pemerintah terkait poros maritim Indonesia.

Setelah melalui tanya jawab, kunjungan dan diskusi yang dihadiri oleh delegasi NWC, perwakilan peserta PPRA LVI dan beberapa Tenaga Ahli Lemhannas RI ini ditutup dengan foto bersama di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lantai IV.

### US Pacom Kunjungi Lemhannas RI

GUBERNUR Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyambut kedatangan US Pacific Command (US Pacom) yang dipimpin oleh Admiral Scott Swift di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI pada Rabu (3/5).

Kunjungan yang didahului dengan Courtesy Call tersebut dilanjutkan dengan diskusi di Ruang Nusantara II Lemhannas RI. Dalam diskusi tersebut, Admiral Scott Swift mengatakan bahwa Lembaga seperti Lemhannas memiliki peran vital dalam membantu mendiskusikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi suatu negara, serta masalah regional maupun global.

Hadir dalam diskusi tersebut Tenaga Profesional Bidang Diplomasi, Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.I.P yang bertindak sebagai moderator, dan beberapa tenaga ahli dari Lemhannas RI yang berlatar belakang angkatan laut.

Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab mendalam mengenai kondisi di Korea Utara dan Laut Cina Selatan, lalu ditutup dengan sesi foto bersama.



### Pelantikan DPP Senam Tera Indonesia

GUBERNUR Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo selaku Ketua Dewan Pembina DPP Senam Tera Indonesia (STI) melantik Pengurus DPP STI di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lantai III, Lemhannas RI pada Kamis (6/4).

Agus Widjojo mengungkapkan bahwa latihan senam tera ini diajarkan kepada para peserta pendidikan Lemhannas RI dan organisasi senam tera juga tumbuh menjadi sebuah organisasi terbuka yang menampung berbagai kalangan masyarakat dari berbagai macam latar belakang seperti suku, budaya, agama, ras, dan golongan.

Sebelum menutup sambutannya, Agus Widjojo berharap dengan kepengurusan barunya, senam tera dapat terus menunjukkan peran aktifnya.





### Lemhannas RI Lantik Pejabat Eselon

WAKIL GUBERNUR Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. mewakili Gubernur Lemhannas RI melantik sejumlah pejabat eselon di Lemhannas RI. Bertempat di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI (4/4).

Dalam sambutannya, Bagus Puruhito menekankan agar para pejabat yang dilantik mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi integritas, loyalitas, moralitas, dan disiplin serta berupaya menghadirkan ide-ide cerdas, kreatif dan inovatif dalam penugasan.

Pejabat yang dilantik pada pelantikan eselon tersebut adalah Brigjen TNI Sudjari S.I.P., M.Si., Marsama TNI Sungkono, S.E., M.Si., Kolonel Laut (E) Suratno, S.H., M.H., Kombes Pol Mulyatno, S.H. M.M., Kolonel Czi Drs. Sindu Tikno Saputro, M.Si., Kolonel Cku Andi Tjarwandi, S.E., Letkol Caj Drs. Mohadib, M.Sc.

Hadir dalam pelantikan tersebut adalah para pejabat struktural dan pengurus Perista Lemhannas RI.



### Kunjungan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) POLRI

ROMBONGAN Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) POLRI yang dipimpin oleh Ketua STIK Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto, S.H., M.Si. melakukan diskusi dengan Lemhannas RI yang diwakili oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI pada Jumat (6/4).

Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Arif Wachyunadi serta para tenaga ahli Lemhannas RI seperti Prof. Dr. Njaju Jenny M.T Hardjanto yang merupakan Tenaga Pengajar Bidang Sosial Budaya dan juga Dr. Anhar Gonggong sebagai Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya. Agus Widjojo memberikan masukan terkait dengan wacana perubahan status STIK menjadi Universitas Pertahanan.

Hadir dalam diskusi tersebut adalah Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksda TNI Dedy Yulianto, Deputy Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Brigjen TNI Sakkan Tampubolon, Tenaga Ahli Lemhannas RI, serta Pejabat Struktural Lemhannas RI. Yang kemudian ditutup dengan penukaran cinderamata dan foto bersama.

### Evaluasi Dampak Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Palu

DIREKTORAT Program dan Pengembangan Pemantapan dari Kedeputian Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Dampak terhadap program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Ruang Rubi Hotel Santika, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (9/5).

Setelah membuka Evaluasi Dampak, Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto. Dalam sambutannya ia berharap bahwa proses Evaluasi Dampak ini dapat mengukur efektivitas program dan outcome yang dihasilkan oleh para Alumni, terutama dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Ikhwani Mado juga memberikan sambutan ayng disusun dengan laporan dari perwakilan Alumni Taplai Palu yaitu Dr. Baharuddin Hi. Hasan.

Turut hadir dalam kegiatan Evaluasi Dampak di Palu yaitu Taji Sismennas Laksda TNI Ir. Yuhastihar, M.M., Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, S.H., serta Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si.





# Tetap Prima Saat di Kantor



K-MARK.CO.ZA

**T**untutan pekerjaan terkadang memaksa seseorang untuk terus duduk di depan layar komputer selama berjam-jam dan tidak melakukan aktivitas fisik apapun.

Kebiasaan ini justru akan berakibat pada berbagai gangguan kesehatan.

Dr. Joanne Foody dari *Cardiovascular Wellnes Center* di *Harvard-Affiliated Brigham and Women's Hospital* mengatakan bahwa terlalu lama duduk dan kurang bergerak atau tidak melakukan aktivitas fisik lain dapat berujung kepada gangguan kesehatan. Studi terakhir mengatakan penyakit diabetes tipe II, kanker, hingga kematian banyak menyerang orang yang kurang bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Sebuah studi lain juga mengatakan bahwa kurang bergerak dan kurang aktivitas meningkatkan resiko penyakit demencia.

Guna menghindari resiko tersebut,

lakukan gerakan ringan di kantor seperti berjalan ke luar dari kursi untuk ke kamar mandi, *pantry* atau menghampiri atasan ke ruangnya. Sebab kesehatan yang prima penting untuk mempertahankan kinerja yang baik dan produktif. Berikut delapan tips untuk tetap prima saat di kantor:

## 1. Ketika Leher Merasa Lelah

Coba duduk dengan posisi tegak, lalu lakukan *stretching* dengan memiringkan leher ke arah pundak secara perlahan, tahan selama 10 detik. Lakukan kembali beberapa kali.

## 2. Atasi Pegal pada Bagian Pundak

Lakukan gerakan dengan posisi duduk tetap tegak. Angkat pundak ke atas hingga mendekati telinga, tahan selama 5 detik. Kemudian, turunkan kembali pundak pada posisi normal, ulangi lagi sehingga otot sekitar bahu bisa beraktivitas.

## 3. Saat Mata Terasa Lelah

Coba olahraga mata dengan memutar bola mata ke kanan, kiri, atas dan bawah beberapa kali. Setiap 30 menit, coba alihkan pandangan mata dari komputer ke arah lain, misalnya ke jendela, jam dinding atau televisi yang terdapat di dalam ruangan guna mengistirahatkan mata sejenak.

## 4. Perhatikan Asupan Air

Dengan berjalan mengisi ulang air, Anda juga membiarkan otot-otot kaki lebih banyak bekerja.

## 5. Duduk dengan Posisi yang Benar.

Pastikan tinggi kursi dan meja sesuai dengan lengan penggunaannya. Ketika kita duduk lurus dengan kaki rata di lantai, lengah harus berada pada sudut 90 derajat ketika mengetik di komputer. Sesuaikan tinggi kursi dan meja sesuai proporsi tubuh masing-masing.

## 6. Dapatkan Cahaya Matahari

Pencahayaannya langsung sinar matahari diyakini bisa meningkatkan produktivitas kerja. Tak hanya itu, ia juga bisa mengurangi kelelahan dan stress serta menghambat penuaan retina.

## 7. Menjaga Kebersihan

Area kerja yang bersih dan rapi dapat membuat pikiran jadi jernih. Ruangan, meja kerja, dan pendingin ruangan (AC) yang jarang dibersihkan bisa menyebabkan pelbagai penyakit. Salah satunya, Legionellosis. Penyakit ini merupakan radang paru-paru yang disebabkan kuman *Legionella pneumophila*. Biasanya, kuman ini bisa berkembang biak pada sistem pendingin AC sentral.

## 8. Beristirahat Sejenak.

Mengambil jeda saat bekerja merupakan hal penting untuk menjernihkan pikiran Anda. Meski sejenak, istirahat dengan mengalihkan diri ke hal di luar pekerjaan, dapat mengisi kembali energi kita. Beranjaklah dari kursi dan keluar ruangan setidaknya selama 10 menit. Hal ini bisa memulihkan diri kita dari ketegangan pekerjaan. ●

(MD/AS)



**Redaksi Swantara Mengucapkan**

**DIRGAHAYU**

**52** *Tahun*

**Lemhannas RI**

